



Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip;
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 163, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
5. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Klasifikasi adalah penggolongan naskah dinas berdasarkan masalah yang termuat didalamnya dan merupakan pedoman untuk pengaturan penataan dan penemuan kembali arsip.
7. Klasifikasi Masalah adalah Penggolongan Arsip yang didasarkan atas isi masalah yang terdapat di dalam arsip.
8. Kode Klasifikasi Arsip adalah merupakan bagian dari klasifikasi arsip yang menjadi tanda pengenal urusan dalam bentuk angka yang berfungsi sebagai penuntun terhadap letak berkas di tempat penyimpanan.
9. Kode Komponen adalah tanda pengenal komponen unit pengolah yang mengolah atau menangani naskah dinas dan ditulis dengan huruf ditempatkan dibelakang nomor urut.

10. Kode Pembantu adalah kode pelengkap yang tidak dapat dipakai tersendiri yang merupakan bentuk penyajian dari masalah tertentu yang merupakan aspek yang selalu timbul berkaitan dengan masalah lainnya dan ditulis ditambahkan dibelakang kode yang memerlukan perincian lebih lanjut.
11. Nomor Urut adalah nomor urut naskah dinas yang dimulai dengan angka 01 dan seterusnya sebagai sarana inventarisasi jumlah naskah dinas, meliputi permulaan tahun dan nomor urut dimulai dengan angka 01.
12. Indeks adalah Ciri atau tanda dari naskah dinas berupa kata rangkap yang akan dijadikan petunjuk dan tanda pengenal untuk memudahkan penemuan kembali arsip.
13. Indeks Kaitan adalah indeks yang terdiri dari himpunan nama nama masalah dan kaitannya yang terdapat dalam pola klasifikasi yang disusun dalam urutan abjad dengan diikuti kodenya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam penggunaan kode Klasifikasi Arsip di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk :
 - a. mewujudkan tertib tata kelola kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - b. memberikan kemudahan dalam mengidentifikasi arsip.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi hal-hal yang berkenaan dengan klasifikasi arsip yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, yaitu:

- a. klasifikasi masalah;
- b. penetapan kode klasifikasi; dan
- c. tata cara klasifikasi arsip.

BAB IV KLASIFIKASI MASALAH

Pasal 4

- (1) Klasifikasi arsip berdasarkan masalah dibagi menjadi 3 (tiga) klasifikasi yaitu :
 - a. klasifikasi masalah;
 - b. klasifikasi sub masalah; dan

- c. klasifikasi sub sub masalah.
- (2) Klasifikasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut:
 - a. umum;
 - b. pemerintahan;
 - c. politik;
 - d. keamanan dan ketertiban;
 - e. kesejahteraan;
 - f. perekonomian;
 - g. pekerjaan umum;
 - h. pengawasan;
 - i. kepegawaian; dan
 - j. keuangan.

BAB V PENETAPAN KODE KLASIFIKASI

Pasal 5

- (1) Klasifikasi arsip berdasarkan kode masalah dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:
 - a. klasifikasi kode masalah;
 - b. klasifikasi kode sub masalah; dan
 - c. klasifikasi kode sub sub masalah.
- (2) Klasifikasi arsip berdasarkan kode masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 000 untuk kode masalah umum;
 - b. 100 untuk kode masalah Pemerintahan;
 - c. 200 untuk kode masalah Politik;
 - d. 300 untuk kode masalah Keamanan dan Ketertiban;
 - e. 400 untuk kode masalah Kesejahteraan;
 - f. 500 untuk kode masalah Perekonomian;
 - g. 600 untuk kode masalah Pekerjaan Umum;
 - h. 700 untuk kode masalah Pengawasan;
 - i. 800 untuk kode masalah Kepegawaian; dan
 - j. 900 untuk kode masalah Keuangan.

BAB VI TATA CARA PENGGUNAAN KLASIFIKASI ARSIP

Pasal 6

Tata cara penggunaan kode klasifikasi arsip tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari Tahun 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 1 Juni 2016
WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 1 Juni 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

H. I. S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 NOMOR 280

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 24 TAHUN 2016
TENTANG
KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA TASIKAMALAYA

PENGGUNAAN KLASIFIKASI ARSIP

A. KLASIFIKASI MASALAH.

1. Klasifikasi kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, Dinas, Badan dan lembaga beserta instansi bawahannya mengikuti Klasifikasi Arsip Pemerintah Kota Tasikmalaya
Klasifikasi tersebut disusun berdasarkan masalah yang mencerminkan fungsi dan kegiatan pemerintah, pembangunan dan pembinaan masyarakat, diperinci secara *DECIMAL*, dengan mempergunakan *TIGA ANGKA DASAR*, dilengkapi dengan kode pembantuan singkatan nama komponen.
2. Pola klasifikasi disusun secara berjenjang dengan mempergunakan prinsip perkembangan dari umum kepada khusus dalam hubungan masalah, didahului oleh 3 perincian dasar, masing-masing perincian pertama, perincian kedua dan perincian ketiga sebagai pola dasar yang berfungsi sebagai jembatan penolong dalam menemukan kode masalah yang tercantum dalam pola klasifikasi.
3. Sesuai dengan sifat desimal arsip dikelompokkan dalam 10 pokok masalah, diberi kode 000 s/d 900. Dari 10 pokok masalah ini terlebih dahulu dibedakan antara tugas substantif (pokok) dan tugas fasilitatif (penunjang). Angka 100 s/d 600 merupakan kode tugas-tugas substantif, sedangkan angka 000, 700, 800, dan 900 merupakan kode tugas-tugas fasilitatif. Kode 000 menampung masalah-masalah fasilitatif diluar masalah pengawasan, kepegawaian dan keuangan. Disamping itu juga ditampung masalah-masalah yang berkaitan dengan kerumah tanggian, seperti protokol urusan dalam dan masalah-masalah yang tidak dapat dimasukkan dalam kelompok lainnya, seperti perjalanan dinas, peralatan, lambang negara atau daerah, tanda-tanda kehormatan dan sebagainya.
4. Dengan demikian maka sepuluh pokok masalah tersebut telah menampung seluruh kegiatan pelaksanaan tugas Pemerintah Kota Tasikmalaya termasuk instansi-instansi dalam lingkungannya.
Sepuluh masalah tersebut adalah sebagai berikut :
000 Umum
100 Pemerintahan
200 Politik
300 Keamanan dan Ketertiban
400 Kesejahteraan
500 Perekonomian
600 Pekerjaan Umum dan Ketenagaan
700 Pengawasan
800 Kepegawaian
900 Keuangan
5. Kode pembantu merupakan bentuk penyajian dari masalah tertentu yang merupakan aspek yang selalu timbul berkaitan dengan masalah

lainnya, ditambah tiap kode yang memerlukan perincian lebih lanjut, untuk dapat memberikan dimensi ekstra pada arsip.

Kode pembantu dimaksud tersebut adalah :

- 01 Perencanaan
- 02 Penelitian
- 03 Pendidikan
- 04 Laporan
- 05 Panitia
- 06 Seminar, Lokakarya, Workshop
- 07 Statistik
- 08 Peraturan perundang-undangan
- 09

6. Untuk mengetahui komponen yang menangani masalah, diperlukan kode dan singkatan nama komponen untuk Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya, diatur sebagai berikut :

Walikota	Walikota Tasikmalaya
Wakil Walikota	Wakil Walikota Tasikmalaya
Setda	Sekretariat Daerah
Sekda	Sekretaris Daerah
Setwan	Sekretariat Dewan
Sekwan	Sekretaris Dewan
Asda Pem	Asisten Administrasi Pemerintahan
Asda ekbang	Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan,
Asda Adum	Asisten Administrasi Umum,
Bag Pem	Bagian Pemerintahan
Bag Perpu	Bagian Bagian Perundang-Undangan
Bag Bhkd	Bagian Hukum dan Kerjasama Daerah
Bag Ek	Bagian Perekonomian
Bag Adpem	Bagian Administrasi Pembangunan
Bag Kesra	Bagian Kesejahteraan Rakyat
Bag Tuh	Bagian Tata Usaha dan Humas
Bag Um	Bagian Umum
Bag Org	Bagian Organisasi
Diskdik	Dinas Pendidikan;
Sekre	Sekretariat,
Bid Dikdas	Bidang Pendidikan Dasar
Bid Dikmen	Bidang Pendidikan Menengah
Bid Paud	Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal, membawahkan
Dinkes	Dinas Kesehatan
Sekre	Sekretariat
Bid Pelkes	Bidang Pelayanan Kesehatan
Bid Kesmas	Bidang Kesehatan Masyarakat
Bid Ppp	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Bid Sdk	Bidang Sumber Daya Kesehatan
DPUPR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sekre	Sekretariat
Bid Taru	Bidang Tata Ruang
Bid Tabang	Bidang Tata Bangunan
Bid Sda	Bidang Sumber Daya Air
Bid Jatan	Bidang Jalan dan Jembatan
DPKP	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sekre	Sekretariat
Bid Pertan	Bidang Perumahan dan Pertanahan
Bid Pertakam	Bidang Pertamanan dan Pemakaman

Bid Permukiman	Bidang Permukiman
Disdukcapil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sekre	Sekretariat
Bid Penduk	Bidang Pelayanan Penduduk
Bid Capil	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
Bid Piak	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Diskoperindag	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
Bid Komik	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
Bid Perdag	Bidang Perdagangan
Bid Perin	Bidang Perdagangan
Dishub	Dinas Perhubungan
Sekre	Sekretariat
Bid Angkut	Bidang Angkutan
Bid Lalin	Bidang Lalu lintas
Diskominfo	Dinas Komunikasi dan Informatika
Sekre	Sekretariat
Bid Aip	Bidang Aplikasi dan Persandian
Bid Ikps	Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik
DPMPPT	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sekre	Sekretariat
Bid Perjas	Bidang Perijinan Jasa Usaha
Bid Pertu	Bidang Perijinan Tertentu
Bid Pendal	Bidang Penanaman Modal
Disbudparpora	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
Sekre	Sekretariat
Bid Par	Bidang Pariwisata
Bid Kebud	Bidang Kebudayaan
Bid Pora	Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
Disperkan	Dinas Pertanian dan Perikanan
Sekre	Sekretariat
Bid Ikan	Bidang Perikanan
Bid Pkh	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
Bid Kultura	Bidang Holtikultura dan Perkebunan
Bid Pangan	Bidang Tanaman Pangan
LH	Dinas Lingkungan Hidup
Sekre	Sekretariat
Bid Pengsam	Bidang Pengelolaan Sampah
Bid Ppkl	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
Bid Klks	Bidang Kajian Lingkungan dan Konservasi SDA
Dinsos	Dinas Sosial
Sekre	Sekretariat
Bid Pjs	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
Bid Resos	Bidang Rehabilitasi Sosial
Bid Pemsos	Bidang Pemberdayaan Sosial
Disnaker	Dinas Tenaga Kerja
Sekre	Sekretariat
Bid	Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Jamsosnaker	Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Bid Pelnakertran	Bidang Pelatihan Produktivitas Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Satpol PP	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Sekre	Sekretariat
Bid Permas	Bidang Perlindungan Masyarakat
Bid Kantibmas	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
Bid Penperpu	Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan
Dis Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sekre	Sekretariat
Bid Arsip	Bidang Kearsipan
Bid Perpustakaan	Bidang Perpustakaan
PPKBPPPA	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sekre	Sekretariat
Bid Pppa	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Bid Pppp	Bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Pengerakan
Bid KB	Bidang KB Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Dis Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
Sekre	Sekretariat
Bid Kkp	Bidang Konsumsi dan Ketahanan Pangan
Bid Dispangan	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
Inspek	Inspektorat
Sekre	Sekretariat
Irban I	Inspektur Pembantu Wilayah I
Irban II	Inspektur Pembantu Wilayah II
Irban III	Inspektur Pembantu Wilayah III
BAPPEDA	Badan Perencanaan Pembangunan Pengembangan dan Penelitian Daerah
Sekre	Sekretariat
Bid Pulh	Bidang Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup
Bid Sosbud	Bidang Sosial dan Budaya
Bid Ekonomi	Bidang Ekonomi
Bid Pem	Bidang Pemerintahan
BKPPD	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Sekre	Sekretariat
Bid Diklat	Bidang Pendidikan dan Pelatihan
Bid Pmk	Bidang Pengembangan Mutasi dan Kepangkatan
Bid Pif	Bidang Pembinaan Informasi dan Formasi
BPPRD	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Sekre	Sekretariat
Bid Ppppd	Bidang Pembukuan, Penagihan Dan Pengendalian Pendapatan Daerah
Bid Pkpd	Bidang Penetapan Dan Keberatan Pajak Daerah
Bid Peljakda	Bidang Pelayanan, Pendaftaran Pendataan Pajak Daerah
BPKAD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Sekre	Sekretariat
Bid Aset	Bidang Aset Daerah
Bid Akun	Bidang Akuntansi
Bid Bendahara	Bidang Perbendaharaan
Bid Ang	Bidang Anggaran
Kesbangpol	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Subag TU	Subagian Tata Usaha

Sek Wasbang	Seksi Pendidikan Politik dan Wawasan Kebangsaan
Sek Hublem	Seksi Hubungan Antar Lembaga
Sek Wasnas	Seksi Kewaspadaan Nasioanal
BPBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
RSUD Dokar	Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soekardjo
RS Destik	Rumah Sakit Dewi Sartika
Kec.Chdg	Kecamatan Cihideung
Kec.Cpds	Kecamatan Cipedes
Kec.Twg	Kecamatan Tawang
Kec.Indhg	Kecamatan Indihiang
Kec.Kwl	Kecamatan Kawalu
Kec.Cbrm	Kecamatan Cibeureum
Kec.Mgkbn	Kecamatan Mangkubumi
Kec.Tmsr	Kecamatan Tamansari
Kec.Bngsr	Kecamatan Bungursari
Kec.Pbrt	Kecamatan Purbaratu
Kel.Bntrsr	Kelurahan Bantarsari
Kel.Bngrsr	Kelurahan Bungursari
Kel.Cbnpls	Kelurahan Cibunigeulis
Kel.Skly	Kelurahan Sukajaya
Kel.Sklksn	Kelurahan Sukalaksana
Kel.Skmly	Kelurahan Sukamulya
Kel.Skrndk	Kelurahan Sukarindik
Kel.Awpr	Kelurahan Awipari
Kel.Ckr	Kelurahan Ciakar
Kel.Chrng	Kelurahan Ciherang
Kel.Krsngr	Kelurahan Kersanagara
Kel.Ktrbr	Kelurahan Kotabaru
Kel.Mrgbkt	Kelurahan Margabakti
Kel.Stjy	Kelurahan Setiajaya
Kel.Stngr	Kelurahan Setianegara
Kel.Strt	Kelurahan Setiaratu
Kel.Argsr	Kelurahan Argasari
Kel.Clmbng	Kelurahan Cilembang
Kel.Ngrwng	Kelurahan Nagarawangi
Kel.Tgij	Kelurahan Tugujaya
Kel.Tgrj	Kelurahan Tuguraja
Kel.Ydngr	Kelurahan Yudanegara
Kel.Cpds	Kelurahan Cipedes
Kel.Ngrsr	Kelurahan Nagarasari
Kel.Pnglyngn	Kelurahan Panglayungan
Kel.Skmnh	Kelurahan Sukamanah
Kel.Indhg	Kelurahan Indihiang
Kel.Pnyngkrn	Kelurahan Panyingkiran
Kel.Prknnysg	Kelurahan Parakannyasag
Kel.Srnglh	Kelurahan Sirnagalih
Kel.Skmjklr	Kelurahan Sukamajukaler
Kel.SkmjkdI	Kelurahan Sukamajukidul
Kel.Cbt	Kelurahan Cibeuti
Kel.Clmjng	Kelurahan Cilamajang
Kel.Gnnggd	Kelurahan Gununggede
Kel.Gnnggd	Kelurahan Gunungtandala
Kel.Krnngnyr	Kelurahan Karanganyar
Kel.Krsmnk	Kelurahan Kersamenak
Kel.Lwlng	Kelurahan Leuwiliang
Kel.Tlgsr	Kelurahan Talagasari

Kel.Tjng	Kelurahan Tanjung
Kel.Urg	Kelurahan Urug
Kel.Cgntng	Kelurahan Cigantang
Kel.Cpr	Kelurahan Cipari
Kel.Cpwtr	Kelurahan Cipawitra
Kel.Krkl	Kelurahan Karikil
Kel.Lnggjy	Kelurahan Linggajaya
Kel.Mngkbn	Kelurahan Mangkubumi
Kel.Smbngjy	Kelurahan Sambongjaya
Kel.Smbngpr	Kelurahan Sambongpari
Kel.Prbrt	Kelurahan Purbaratu
Kel.Snkp	Kelurahan Singkup
Kel.Sksh	Kelurahan Sukaasih
Kel.Skjy	Kelurahan Sukajaya
Kel.Skmnk	Kelurahan Sukamenak
Kel.Skngr	Kelurahan Sukanegara
Kel.Mgrsr	Kelurahan Mugarsari
Kel.Mlysr	Kelurahan Mulyasari
Kel.Stmly	Kelurahan Setiamulya
Kel.Stwrg	Kelurahan Setiawargi
Kel.Skhrp	Kelurahan Sukahurip
Kel.Smlp	Kelurahan Sumelap
Kel.Tmnjy	Kelurahan Tamanjaya
Kel.Tmnsr	Kelurahan Tamansari
Kel.Cklng	Kelurahan Cikalang
Kel.Khrpn	Kelurahan Kahuripan
Kel.Lngkngsr	Kelurahan Lengkongsari
Kel.Twngsr	Kelurahan Tawang Sari
Kel.Empngsr	Kelurahan Empangsari

B. PENETAPAN KODE KLASIFIKASI.

1. Perincian Pertama:

- 000 Umum
- 100 Pemerintahan
- 200 Politik
- 300 Keamanan/ketertiban
- 400 Kesejahteraan Rakyat
- 500 Perekonomian
- 600 Pekerjaan Umum dan Ketenagaan
- 700 Pengawasan
- 800 Kepegawaian
- 900 Keuangan

2. Perincian Kedua:

- 000 UMUM
- 010 Urusan dalam
- 020 Peralatan
- 030 Kekayaan Daerah
- 040 Perpustakaan/dokumentasi/kearsipan/sandi
- 050 Perencanaan
- 060 Organisasi /ketatalaksanaan
- 070 Penelitian
- 080 Konferensi
- 090 Perjalanan Dinas
- 100 PEMERINTAHAN
- 110 Pemerintah Pusat
- 120 Pemerintah Provinsi
- 130 Pemerintah Kabupaten / Kota
- 140 Pemerintah Desa / Kelurahan
- 150 DPR / MPR
- 160 DPRD Provinsi
- 170 DPRD Kabupaten/Kota
- 180 Hukum
- 190 Hubungan Luar Negeri
- 200 POLITIK
- 210 Kepartaian
- 220 Organisasi Kemasyarakatan
- 230 Organisasi Profesi dan Fungsional
- 240 Organisasi Pemuda
- 250 Organisasi Buruh, tani dan nelayan
- 260 Organisasi Wanita
- 270 Pemilihan Umum
- 280 Komisi Pemilihan Umum
- 290 Badan Pengawas Pemilu
- 300 KEAMANAN / KETERTIBAN
- 310 Pertahanan
- 320 Kemiliteran
- 330 Keamanan
- 340 Pertahanan Sipil
- 350 Kejahatan
- 360 Bencana
- 370 Kecelakaan
- 380 -
- 390 -
- 400 KESEJAHTERAAN RAKYAT

- 410 Jaringan Pengaman Sosial
- 420 Pendidikan
- 430 Kebudayaan
- 440 Kesehatan
- 450 Agama
- 460 Sosial
- 470 Kependudukan
- 480 Media Masa
- 490 -
- 500 PEREKONOMIAN
- 510 Perdagangan
- 520 Pertanian
- 530 Perindustrian
- 540 Pertambangan Kesamudraan
- 550 Perhubungan
- 560 Tenaga Kerja
- 570 Permodalan
- 580 Perbankan/Moneter
- 590 Agraria
- 600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN
- 610 Pengairan
- 620 Jalan
- 630 Jembatan
- 640 Bangunan
- 650 Tata Kota
- 660 Tata Lingkungan
- 670 Ketenagaan
- 680 Peralatan
- 690 Air Minum
- 700 PENGAWASAN
- 710 Bidang Pemerintahan
- 720 Bidang Politik
- 730 Bidang Keamanan / Ketertiban
- 740 Bidang Kesejahteraan Rakyat
- 750 Bidang Perekonomian
- 760 Bidang Pekerjaan Umum
- 770 -
- 780 Bidang Kepegawaian
- 790 Bidang Keuangan
- 800 KEPEGAWAIAN
- 810 Pengadaan
- 820 Pengangkatan dan Mutasi
- 830 Kedudukan
- 840 Kesejahteraan
- 850 Cuti
- 860 Penilaian
- 870 Tata Usaha
- 880 Pemberhentian
- 890 Pendidikan
- 900 KEUANGAN
- 910 Anggaran
- 920 Otoritasi
- 930 Verifikasi
- 940 Pembukuan

- 950 Perbendaharaan
- 960 Pembinaan Kebendaharaan
- 970 Pendapatan
- 980 -
- 990 Bendaharawan

**KLASIFIKASI ARSIP
PERINCIAN KETIGA**

000 UMUM

- 000 UMUM
- 001 Lambang
 - .1 Garuda
 - .2 Bendera Kebangsaan
 - .3 Lagu Kebangsaan
 - .4 Daerah
 - .41 Provinsi
 - .42 Kabupaten/Kota
 - .43 LPND
 - .44 Lembaga lainnya
- 002 Tanda Kehormatan/Penghargaan untuk pegawai lihat 861.10
 - .1 Bintang
 - .2 Satyalencana
 - .3 Parasamya Purna Karya Nugraha
 - .4 Monumen
 - .5 Penghargaan Secara Adat
 - .6 Penghargaan lainnya
- 003 Hari Raya/Besar
 - .1 Nasional 17 Agustus, Hari Pahlawan, dan sebagainya
 - .2 Hari Raya Keagamaan
 - .3 Hari Ulang Tahun
 - .4 Hari-hari Besar Internasional, hari hari besar lainnya
- 004 Ucapan
 - .1 Ucapan Terima Kasih
 - .2 Ucapan Selamat
 - .3 Ucapan Belasungkawa
 - .4 Ucapan Lainnya
- 005 Undangan
- 006 Tanda Jabatan
 - .1 Pamong Praja
 - .2 Tanda Pengenal
 - .3 Pejabat lainnya
- 007 -
- 008 -
- 009 -
- 010 URUSAN DALAM
- 011 Gedung Kantor/Termasuk Instalasi Prasarana Fisik/Kantor Dinas
 - .1 Prasarana Fisik Pamong /Kantor Dinas
- 012 Rumah Dinas
 - .1 Tanah Untuk Rumah Dinas
 - .2 Perabot Rumah Dinas
 - .3 Rumah Dinas Golongan 1
 - .4 Rumah Dinas Golongan 2
 - .5 Rumah Dinas Golongan 3

- .6 Rumah/Bangunan Lainnya
- .7 Rumah Pejabat Negara

- 013 Mess/Guest House/panti/wisma/Rumah Susun/Apartemen
- 014 Jasa Air
- 015 Penerangan Listrik/Jasa Listrik
- 016 Telepon/Faximile/Internet

- 017 Keamanan/Ketertiban Kantor
- 018 Jasa Kebersihan Kantor
- 019 Protokol
 - .1 Upacara Bendera
 - .2 Tata Tempat
 - .21 Pemasangan Gambar Presiden/Wakil Presiden
 - .22 Pemasangan gambar Gubernur, Wakil Gubernur
 - .23 Pemasangan gambar Walikota, Wakil Walikota
 - .3 Audiensi / Menghadap Pimpinan
 - .4 Alamat-Alamat Kantor dan Pejabat
 - .5 Bandir/Umbul-Umbul/Spanduk
 - .51 Launching
- 020 PERALATAN KANTOR
 - .1 Penawaran
- 021 Alat Tulis Kantor
- 022 Mesin Kantor
- 023 Perabot Kantor
- 024 Alat Angkutan/Kendaraan Dinas
- 025 Pakaian Dinas
- 026 Senjata/Alat Pengaman Kantor
- 027 Pengadaan Barang / Jasa
 - .1 Penunjukan Langsung
 - .2 Pemilihan Lansung
 - .3 Seleksi
 - .4 Lelang
- 028 Inventaris
- 029 -
- 030 KEKAYAAN DAERAH
- 031 Sumber Daya Alam
- 032 Asset Daerah
- 033 Pemanfaatan Kekayaan Daerah
- 034 Penamanan Kekayaan Daerah
- 035 Penghapusan Aset
- 036 Kekayaan Lainnya
- 037 Bangunan
- 038 Lapang/halaman/tanah kosong
- 039 -
- 040 PERPUSTAKAAN DOKUMENTASI / KEARSIPAN / SANDI
- 041 Perpustakaan
 - .1 Umum
 - .2 Khusus
 - .3 Perguruan Tinggi
 - .4 Sekolah
 - .5 Keliling
 - . Pengadaan Bahan Pustaka
 - .7 Pelayanan
 - .8 Pemeliharaan
- 042 Dokumentasi

- 043 Jaringan Informasi
 - .1 LAN
 - .2 WAN
- 044 -
- 045 Kearsipan
 - .1 Pola Klasifikasi
 - .2 Penataan Berkas
 - .3 Penyusutan Arsip
 - .31 Jadwal Retensi Arsip
 - .32 Pemindahan Arsip
 - .33 Penilaian Arsip
 - .34 Pemusnahan Arsip
 - .35 Penyerahan Arsip
 - .36 Berita Acara Penyusutan Arsip
 - .37 Daftar Pencarian Arsip
 - .4 Penelolaan Arsip Dinamis
 - .41 Arsip Aktif
 - .42 Arsip In Aktif
 - .43 Arsip Vital
 - .5 Pengelolaan Arsip Statis
 - .51 Akuisisi
 - .52 Pengolahan
 - .53 Akses Arsip Statis
 - .6 Pembinaan Kearsipan
 - .61 Bimbingan Teknis
 - .7 Pemeliharaan /Perawatan Arsip
 - .71 Pengawetan/Fumigasi
 - .8 Arsip Media Baru
- 046 Sandi
- 047 Website
- 048 Pengelolaan Data Elektronik
- 049 Jaringan Komunikasi Data
- 050 PERENCANAAN
 - .1 Repelita/8 Sukses
 - .11 Pelita Daerah
 - .12 Bantuan Pembangunan Daerah
 - .13 Bappeda
- 051 Bidang Pemerintahan
- 052 Bidang Politik
- 053 Bidang Keamanan Dan Ketertiban
- 054 Bidang Kesejahteraan Rakyat
- 055 Bidang Perekonomian
- 056 Bidang Pekerjaan Umum
- 057 Bidang Pengawasan
- 058 Bidang Kepegawaian
- 059 Bidang Keuangan
- 060 ORGANISASI / KETATALAKSANAAN
- 061 Organisasi Instansi Pemerintah (struktur organisasi)
 - .1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja
 - .2 Tata Tertib Kantor
- 062 Organisasi/Badan Non Pemerintah
- 063 Organisasi/Badan Internasional
- 064 Organisasi/Semi Pemerintah
- 065 Ketatalaksanaan / Tata Naskah / Sistem
 - .1 Tata Naskah Dinas
 - .2 Stempel

- .21 Stempel Jabatan
- .22 Stempel Dinas
- .3 Papan Nama Instansi Pemerintah / Non Pemerintah
- .4 Organisasi yang diubah, digabung dan dihapus/Likuidasi
- 066 Tata Hubungan Kerja
 - .1 Telaah Tata Hubungan Kerja
 - .2 Penyusunan
 - .3 Bimbingan
- 067 Pelayanan Umum / Pelayanan Publik / Analisis
- 068 Standar Pelayanan Minimal
- 069 Analisis Jabatan dan Pengukuran Beban Kerja
 - .1 Analisis Jabatan
 - .2 Hasil Analisis Jabatan
 - .3 Penilaian Jabatan Struktural dan Fungsional
- 070 PENELITIAN
 - .1 Teknologi Tepat Guna
- 071 Riset
- 072 Survey
- 073 Kajian
- 074 Kerjasama Penelitian Dengan Perguruan Tinggi dan instansi lain
- 075 Kerja Sama Penelitian dengan Kementerian Lainnya
- 076 Kerja Sama Penelitian dengan Non Kementerian
- 077 Kerja Sama Penelitian dengan Pemerintah Daerah Lainnya
- 078 Rekomendasi Penelitian
- 079 Pemaparan/ekspose
- 080 KONFERENSI / RAPAT / SEMINAR
- 081 Gubernur
- 082 Bupati / Walikota
- 083 Komponen, Eselon Lainnya
- 084 Instansi Lainnya
- 085 Internasional Di Dalam Negeri
- 086 Internasional Di Luar Negeri
- 087 -
- 088 -
- 089 -
- 090 PERJALANAN DINAS
- 091 Perjalanan Presiden/Wakil Presiden di dalam Negeri
- 092 Perjalanan Menteri di Dalam Negeri
- 093 Perjalanan Pejabat Tinggi (Pejabat Eselon 1)
- 094 Perjalanan Pegawai Termasuk Pemanggilan Pegawai
- 095 Perjalanan Tamu Asing Ke Daerah
- 096 Perjalanan Presiden/Wakil Presiden Ke Luar Negeri
- 097 Perjalanan Pejabat Daerah Ke Luar Negeri
- 098 Perjalanan Pejabat Negara Ke Luar Negeri
- 099 Perjalanan Pegawai ke Luar Negeri

100 PEMERINTAHAN

- 100 PEMERINTAHAN
Meliputi: Tata Praja, Legislatif, Yudikatif, Hubungan luar
- 101 Bentuk Pemerintahan
- 102 Sistem Pemerintahan
- 103 -
- 104 -
- 105 -
- 106 -
- 107 -
- 108 -
- 109 -
- 110 PEMERINTAHAN PUSAT
- 111 Presiden
Meliputi: pencalonan, pengangkatan, pelantikan, sumpah, serah terima jabatan, pemberhentian, dan sebagainya
 - .1 Pertanggung jawaban presiden
 - .2 Amanat Presiden/Amanat Kenegaraan
- 112 Wakil Presiden
Meliputi: pencalonan, pengangkatan, pelantikan, sumpah, serah terima jabatan, pemberhentian dan sebagainya
- 113 Susunan Kabinet
 - .1 Reshuffle
 - .2 Penunjukan Menteri *ad interim*
 - .3 Sidang Kabinet
- 114 Kementerian Dalam Negeri
Meliputi : Pengangkatan, pelantikan, sumpah dan serah terima jabatan
 - .1 Amanat Menteri Dalam Negeri
- 115 Kementerian Departemen lainnya
Meliputi : Pengangkatan, pelantikan, sumpah dan serah terima jabatan
 - .1 Amanat Menteri Lainnya
- 116 Lembaga Tinggi Negara
Meliputi : Pengangkatan, pelantikan, sumpah dan serah terima jabatan
- 117 Lembaga Pemerintah Non Kementerian
- 118 Otonomi Daerah/Desentralisasi/Dekonsentrasi
- 119 Kerjasama Antar Departemen
- 120 PEMERINTAH PROVINSI
 - 04 Laporan daerah tambahkan kode wilayah
- .042 Monografi tambahkan kode wilayah
 - .1 Koordinasi
 - .2 Instansi Tingkat Provinsi
 - .21 Organisasi Perangkat Daerah
 - .22 Instansi Vertikal
 - .3 Kerjasama antar Provinsi/Daerah
- 121 Gubernur tambahkan kode wilayah, meliputi: Pencalonan, Pengangkatan, Meninggal, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan dan sebagainya.
- 122 Wakil Gubernur meliputi: tambahkan kode wilayah pencalonan, Pengangkatan, Meninggal, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan dan sebagainya.
- 123 Sekretaris Wilayah tambahkan kode wilayah, meliputi: Pencalonan, Pengangkatan, Meninggal, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan dan sebagainya.

- 124 Pembentukan/Pemekaran Wilayah
 - .1 Pembentukan Daerah Otonom
 - .2 Perubahan Batas Wilayah
 - .3 Pemekaran Wilayah
 - Penambahan ibukota propinsi, pemberian dan penggantian nama
 - .4 ibukota, daerah, gunung, sungai, pulau, selat, jalan dsb
- 125 Forum Koordinasi Pemerintah di Daerah
 - .1 Pemerintah Provinsi
 - .2 Panitia Anggaran Provinsi
 - .3 Seminar, lokakarya dan Lainnya
- 126 Pembagian Wilayah
- 127 Otonomi Daerah
- 128 Swaparaja/Penataan Wilayah/Daerah
- 129 Tugas Pembantuan
- 130 PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA
 - .1 Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 - .2 Koordinasi
 - .3 Instansi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - .31 Organisasi Perangkat Daerah
 - .4 Kerjasama Daerah
 - .41 Kerjasama dengan Pemerintah
 - .42 Kerjasama dengan Pihak Ketiga
 - .43 Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)
- 131 Bupati /Walikota, Tambahkan Kode Wilayah
 - Meliputi: Pencalonan, Pengangkatan, Meninggal, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan, dsb
 - .1 Berita acara jabatan dan memori Bupati/Walikota
 - .2 Sambutan / Pengarahan / Amanat Bupati/Walikota
- 132 Wakil Bupati /Walikota, Tambahkan Kode Wilayah,
 - Meliputi: Pencalonan, Pengangkatan, Meninggal, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan,
- 133 Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Tambahkan Kode Wilayah,
 - Meliputi: Pencalonan, Pengangkatan, Meninggal, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan,
- 134 Forum Koordinasi Pemerintah Di Daerah
 - .1 Muspida/Forum Konsultasi Pimpinan Daerah
 - .2 Forum PAN (Panitian Anggaran Nasional)
 - .3 Forum Koordinasi Lainnya
 - .4 Kerjasama/Koordinasi antar Kabupaten/Kota
- 135 Pembentukan / Pemekaran Wilayah
 - .1 Pembentukan Daerah Otonom
 - .2 Perubahan Batas Wilayah
 - .3 Pemekaran Wilayah
 - .4 Permasalahan Batas Wilayah
 - .5 Pemindahan Ibukota Kabupaten/Kota
 - .6 Pemberian dan Penggantian Nama Kota, Daerah, Jalan
 - .7 Pemetaan Wilayah
 - .8 Penegasan Batas wilayah Kab/Kota
- 136 Pembagian Wilayah
- 137 Penyerahan Urusan/otonomi daerah/otonomi khusus
- 138 Pemerintah wilayahKecamatan
 - .1 Sambutan / Pengarahan / Amanat Camat
 - .2 Pembentukan Kecamatan
 - .3 Pemekaran Kecamatan
 - .4 Perluasan/Perubahan Batas Wilayah Kecamatan
 - .5 Pemindahan Ibukota Kecamatan

- .6 Penegasan batas wilayah Kecamatan
- 139 Nama rupa bumi
- 140 PEMERINTAHAN DESA / KELURAHAN
 - Pamong Desa, Meliputi: Pencalonan, Pemilihan, Meninggal,
- 141 Pengangkatan, Pemberhentian, dan sebagainya
- 142 Penghasilan Pamong Desa
- 143 Kekayaan Desa
- 144 Dewan Tingkat Desa, Dewan Marga, Rembug Desa
- 145 Administrasi Desa
- 146 Kewilayahan
 - .1 Pembentukan Desa/Kelurahan
 - .2 Pemekaran Desa/Kelurahan
 - .3 Perubahan Batas Wilayah / Perluasan Desa / Kelurahan
 - .4 Perubahan Nama Desa / Kelurahan
 - .5 Kerjasama Antar Desa / Kelurahan
- 147 Lembaga-lembaga Tingkat Desa
 - Jangan Klasifikasikan Disini, Lihat 410 Dengan Perinciannya
- 148 Pemerintahan Kelurahan
 - .1 Kepala Kelurahan/lurah
 - Meliputi : pengangkatan, pemberhentian dan pemberhentian sementara
 - .2 Sekretaris Kelurahan
 - Meliputi : pengangkatan, pemberhentian dan pemberhentian sementara
 - .3 Kepala Lingkungan/Kepala Seksi
 - Meliputi : pengangkatan, pemberhentian dan pemberhentian sementara
 - .4 Administrasi Kelurahan/Pelaksana kelurahan
 - .5 Lembaga lembaga Tingkat Kelurahan /Administrasi Kelurahan
- .51 Administrasi umum
- .52 Administrasi Kependudukan
- .53 Administrasi Keuangan
- .54 Administrasi Pembangunan
- .55 Administra lainnya
- .6 Kewilayahan
- .61 Pembentukan Kelurahan
- .62 Pemekaran Kelurahan
- .63 Perubahan batas wilayah/perluasan kelurahan
- .64 Perubahan nama kelurahan
- .65 Kerjasama antar kelurahan
- .66 Penegasan batas wilayah kelurahan
- 149 Lembaga Kelurahan/Lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan
 - .1 Rukun Tetangga
 - .2 Rukun Warga
 - .3 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
 - .4 Program kesejahteraan keluarga (PKK)
 - .5 Karang taruna
 - .6 Badan Kesewadayaan Masyarakat (BKM)
 - .7 Lembaga Kemasyarakatan lainnya
- 150 MPR / DPR / DPD
- 151 Keanggotaan MPR
 - .1 Pencalonan
 - .2 Pengangkatan
 - .3 Pemberhentian
 - .31 Recall
 - .32 Meninggal
 - .4 Pergantian Antar Waktu
 - .5 Pelanggaran
- 152 Persidangan MPR

- 153 Kesejahteraan
 - .1 Keuangan
 - .2 Penghargaan
- 154 Hak/saran/pendapat MPR
- 155 Keanggotaan DPR/DPD
 - .1 Pencalonan
 - .2 Pengangkatan
 - .3 Pemberhentian
 - .31 Recall
 - .32 Meninggal
 - .4 Pergantian Antar Waktu
 - .5 Pelanggaran
- 156 Persidangan DPR/DPD
 - .1 Sidang Pleno
 - .2 DengarPendapat
 - .3 Rapat Komisi
 - .4 Reses
 - .5 Rapat Fraksi
- 157 Kesejahteraan
 - .1 Keuangan
 - .2 Penghargaan
- 158 Jawaban Pemerintah
- 159 Hak DPR
 - .1 Amandemen
 - .2 Angket
 - .3 Buget
 - .4 Interplasi
- 160 DPRD PROVINSI TAMBAHKAN KODE WILAYAH
- 161 Keanggotaan
 - .1 Pencalonan
 - .2 Pengangkatan
 - .3 Pemberhentian
 - .31 Recall
 - .32 Meninggal
 - .4 Pelanggaran
- 162 Persidangan
 - .1 Tata tertib
 - .2 Sidang Pleno
 - .3 Dengar pendapat/hearing/dialog
Rapat rapat meliputi: Rapat Panitia Musyawarah, Komisi, Fraksi,
 - .4 Panitia Khusus, Panitia Anggaran dsb.
 - .5 Reses
 - .6 Peninjauan Studi Banding
 - .7 Kunjungan Kerja
- 163 Kesejahteraan
 - .1 Keuangan
 - .11 Gaji/honor
 - .12 Tunjangan
 - .2 Penghargaan
- 164 Hak DPRD
 - .1 Budget
 - .2 Interplasi
 - .3 Amandemen
 - .4 Angket
 - .5 Lainnya
- 165 Sekretaris DPRD Provinsi

- 166 Alat Kelengkapan Dewan
 - .1 Badan Anggaran
 - .2 Badan Kehormatan
 - .3 Fraksi
 - .4 Komisi
 - .5 Lainnya
- 167 Tenaga Ahli DPRD
- 168 -
- 169 -
- 170 DPRD KABUPATEN TAMBAHKAN KODE WILAYAH
- 171 Keanggotaan
 - .1 Pencalonan
 - .2 Pengangkatan
 - .3 Pemberhentian
 - .31 Recall
 - .32 Meninggal
 - .4 Pelanggaran
- 172 Persidangan DPRD Kota
 - .1 Tata tertib
 - .2 Sidang Pleno
 - .3 Dengar pendapat/hearing/dialog
Rapat rapat meliputi: Rapat Panitia Musyawarah, Komisi, Fraksi,
 - .4 Panitia Khusus, Panitia Anggaran dsb.
 - .5 Reses
 - .6 Peninjauan Studi Banding
 - .7 Kunjungan Kerja
- 173 Kesejahteraan
 - .1 Keuangan
 - .11 Gaji/honor
 - .12 Tunjangan
 - .2 Penghargaan
- 174 Hak/saran/pendapat
 - .1 Budget
 - .2 Interplasi
 - .3 Amandemen
 - .4 Angket
 - .5 Lainnya
- 175 Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota
- 176 Alat Kelengkapan Dewan
 - .1 Badan Anggaran
 - .2 Badan Kehormatan
 - .3 Fraksi
 - .4 Komisi
 - .5 Lainnya
- 177 Tenaga Ahli DPRD
- 178 -
- 179 -
- 180 HUKUM
 - .1 Kontitusi
 - .11 Dasar Hukum
 - .12 Undang-Undang Dasar
 - .2 Amandemen
 - .3 Amnesti, Abolisi dan Grasi
- 181 Perdata
 - .1 Tanah
 - .2 Rumah

- .3 Utang/Piutang
- .31 Gadai
- .32 Hipotik
- .4 Notaris
- 182 Pidana
 - .1 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
- 183 Peradilan
 - .1 Jenis jenis peradilan
 - .11 Peradilan Umum
 - .111 Pengadilan negeri tingkat pertama
 - .112 Pengadilan tinggi
 - .113 Mahkamah Agung
 - .114 Mahkamah Kontitusi
 - .12 Peradilan agama islam
 - .121 Peradilan Agama islam tingkat pertama
 - .122 Pengadilan tinggi agama islam
 - .123 Mahkamah agung agama islam
 - .13 Peradilan militer
 - .131 Mahkamah militer tingkat pertama
 - .132 Mahkamah militer tinggi
 - .133 Mahkamah militer agung
 - .14 Peradilan tata usaha Negara
 - .141 Peradilan tata usaha Negara tingkat pertama
 - .142 Peradilan tata usaha Negara tinggi
 - .143 Peradilan tata usaha Negara agung
 - .15 Peradilan Koneksitas
 - .2 Upaya-upaya Hukum
 - .21 Banding
 - .22 Kasasi
 - .23 Derden Verzet
 - .24 Peninjauan Kembali
 - .3 Eksekusi
 - .31 Penyitaan Lahan/Bangunan
 - .4 Pembinaan Hukum
 - .41 Pembinaan Kesadaran Hukum (KADARKUM)
 - .5 Bantuan Hukum
 - .51 Lembaga Bantuan Hukum
- 184 Hukum Internasional
- 185 Imigrasi
 - .1 Visa
 - .2 Pasport
 - .3 Exit
 - .4 Reentry
 - .5 Lintas Batas/Batas Antar Negara
- 186 Kepenjaraan/Lembaga Pemasarakatan
- 187 Kejaksaan
 - .1 Saksi
 - .2 Terdakwa
- 188 Peraturan Perundang-Undangan
 - .1 TAP MPR
 - .2 Undang-Undang Dasar
 - .3 Peraturan
 - .31 Peraturan Pemerintah
 - .32 Peraturan Menteri
 - .33 Peraturan Lembaga Non Departemen
 - .34 Peraturan Daerah

- .341 Peraturan Provinsi
- .342 Peraturan Kabupaten/Kota
 - .4 Keputusan
 - .41 Presiden
 - .42 Menteri
 - .43 Lembaga Non Departemen
 - .44 Gubernur
 - .45 Bupati/Walikota
 - .5 Instruksi
 - .51 Presiden
 - .52 Menteri
 - .53 Lembaga Non Departemen
 - .54 Gubernur
 - .55 Bupati/Walikota
- 189 Hukum Adat
 - .1 Tokoh Adat/Masyarakat
- 190 HUBUNGAN LUAR NEGERI
- 191 Perwakilan Asing
- 192 Tamu Negara
- 193 Kerjasama Dengan Negara Asing
 - .1 Bilateral
 - .2 Multilateral
 - .3 Regional (ASEAN)
 - .4 Internasional
- 194 Perwakilan RI Di Luar Negeri
 - .1 Kedutaan
 - .2 Konsulat
 - .3 Kuasa Usaha
 - .4 Atase
- 195 PBB
 - .1 UNESCO
 - .2 UNICEF
 - .3 FAO
 - .4 UNHCR
 - .5 WHO
 - .6 Organisasi Lainnya
- 196 Laporan Luar Negeri
- 197 Hutang Luar Negeri PHLN/LOAN
- 198 -
- 199 -

200 POLITIK

- 200 POLITIK
- 201 Kebijakan umum
- 202 Orde Lama (1945-1965)
- 203 Orde baru (1966-2000)
- 204 Orde Reformasi (2001-2004)
- 205 Orde Persatuan (2004)
- 206 Politik Dalam Negeri
- 207 Kewaspadaan Nasional
- 208 -
- 209 -
- 210 KEPARTAIAN
- 211 Lambang partai
- 212 Kartu tanda anggota
- 213 Bantuan keuangan parpol
- 214 Program Parpol
- 215 AD / ART
- 216 Pengurus Partai
 - .1 Pimpinan Pusat
 - .2 Pimpinan Wilayah
 - .3 Pimpinan Cabang
 - .4 Pimpinan Anak Cabang
 - .5 Pimpinan Ranting
- 217 Pertemuan Partai
 - .1 Muktamar
 - .2 Munas
 - .3 Kongres
- 218 Kaderisasi Partai
- 219 Pembinaan Partai
- 220 ORGANISASI KEMASYARAKATAN
- 221 Berdasarkan perjuangan
 - .1 Perintis kemerdekaan
 - .2 angkatan 45
 - .3 Veteran
- 222 Berdasarkan Kekaryaan
 - .1 PEPABRI
 - .2 Wredatama
- 223 Berdasarkan kerohanian
 - .1 Nahdatul Ulama
 - .2 Muhammadiyah
 - .3 Persis
 - .4 PGI
 - .5 Dan lain-lainnya
- 224 Lembaga adat
- 225 Lembaga Swadaya Masyarakat
- 226 Ormas Berdasarkan Kedaerahan
 - .1 Paguyuban Pasundan
 - .2 Dan lain-lainnya
- 227 Pembinaan dan Bantuan Keuangan Ormas
- 228 -
- 229 -
- 230 ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL
- 231 Organisasi Kesehatan
 - .1 Ikatan Dokter Indonesia
 - .2 Ikatan Bidan Indonesia

- .3 Organisasi Kesehatan Lainnya
- 232 Organisasi Guru
 - .1 Persatuan Guru Republik Indonesia
 - .2 Organisasi Guru Swasta/Organisasi Guru Lainnya
- 233 Organisasi Sarjana
 - .1 Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia
 - .2 Persatuan Insinyur Indonesia
 - .3 Persatuan Sarjana Muda Indonesia
 - .4 Masyarakat Ilmu Pemerintah Indonesia
- 234 Organisasi Advokat/Pengacara
- 235 Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
- 236 Korps Pegawai Republik Indonesia
- 237 Organisasi Wartawan Indonesia
 - .1 Persatuan Wartawan Indonesia
 - .2 Asosiasi Jurnalis Indonesia
 - .3 Organisasi Wartawan Lainnya
- 238 Organisasi Kearsipan dan Perpustakaan
 - .1 Asosiasi Arsiparis Indonesia
 - .2 Ikatan Pustakawan Indonesia
- 239 Organisasi Profesi Dan Fungsional Lainnya
- 240 ORGANISASI PEMUDA
- 241 Komite Nasional Pemuda Indonesia
- 242 Organisasi Mahasiswa
- 243 Organisasi Pelajar
- 244 Organisasi Pemuda Keagamaan
- 245 Organisasi Pemuda Kepartaian
- 246 Organisasi Pemuda Lainnya
- 247 -
- 248 -
- 249 -
- 250 ORGANISASI BURUH, TANI, NELAYAN DAN ANGKUTAN
- 251 Organisasi Pekerja / Buruh
 - .1 Nasional
 - .2 Internasional
- 252 Organisasi Petani
 - .1 Himpunan Kerukunan Tani dan lain-lainnya
- 253 Organisasi Nelayan
 - .1 Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia
- 254 Organisasi Angkutan Darat
- 255 Organisasi Angkutan Laut
- 256 Organisasi Angkutan Udara
- 257 -
- 258 -
- 259 -
- 260 ORGANISASI WANITA
- 261 Dharma Wanita
- 262 Persatuan Wanita Indonesia
- 263 Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia
- 264 Persit Kartika Candra
- 265 Via Ardia Gharini
- 266 Jala Senasti
- 267 Bhayangkari
- 268 Organisasi Wanita Lainnya
- 269 PKK
- 270 PEMILIHAN UMUM
 - .1 Pemilihan Legislatif

- .11 Pemilihan DPD
- .12 Pemilihan DPR
- .13 Pemilihan DPRD Provinsi
- .14 Pemilihan DPRD Kota/Kabupaten
- .2 Pemilihan Presiden
- .3 Pemilihan Kepala Daerah
- .31 Pemilihan Gubernur
- .32 Pemilihan Walikota/Bupati
- .4 Tim Desk
- .41 Tim Desk Pemilihan Legislatif
- .42 Tim Desk Pemilihan Presiden
- .43 Tim Desk Pilkada Gubernur
- .44 Tim Desk Pilkada Walikota/Bupati
- 271 Pencalonan
- 272 Nomor Urut Partai / Tanda Gambar
- 273 Kampanye
- 274 Petugas Pemilu
- 275 Pemilih / Daftar Pemilih
- 276 Sarana
 - .1 TPS
 - .2 Kendaraan
 - .3 Surat Suara
 - .4 Kotak Suara
 - .5 Dana
- 277 Pemungutan Suara / Perhitungan Suara
- 278 Penetapan Hasil Pemilu
- 279 Penetapan Perolehan Jumlah Kursi Dan Calon Terpilih
- 280 KOMISI PEMILIHAN UMUM
- 281 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
- 282 Komisi Pemilihan Umum Provinsi
- 283 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- 284 Panitia Pemilihan Kecamatan
- 285 Panitia Pemungutan Suara
- 286 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
- 287 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
- 288 Sengketa Pemilu
- 289 -
- 290 BADAN PENGAWAS PEMILU
- 291 Badan Pengawas Pemilu Indonesia
- 292 Badan Pengawas Pemilu Provinsi
- 293 Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota
- 294 Badan Pengawas Pemilu Kecamatan
- 295 Pengawas Pemilu Lapangan
- 296 Pengawas Pemilu Luar Negeri
- 297 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
- 298 Dewan Kehormatan Provinsi
- 299 -

300 KEAMANAN / KETERTIBAN

- 300 KEAMANAN / KETERTIBAN
- 301 Keamanan
- 302 Ketertiban
- 303 Penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah
 - .1 Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan
 - .2 Penyelidikan dan Penyidikan
- 304 Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
 - .1 Operasi Pengendalian
 - .2 Kerja Sama
- 305 Sumber Daya Aparatur Keamanan dan Ketertiban
 - .1 Pelatihan Dasar
 - .2 Pelatihan Teknis
- 306 Perlindungan Masyarakat
 - .1 Satuan Perlindungan Masyarakat
 - .2 Bina Potensi Masyarakat
- 307 -
- 308 -
- 309 -
- 310 PERTAHANAN
- 311 Darat
- 312 Laut
- 313 Udara
- 314 Intelejen
- 315 Sistem Pertahanan
- 316 Perbatasan
- 317 -
- 318 -
- 319 -
- 320 KEMILITERAN
- 321 Latihan Militer
- 322 Wajib Militer
- 323 Operasi Militer
- 324 Kekaryaan TNI Pejabat Sipil dari TNI
 - .1 TMD
- 325 Tentara Nasional Indonesia
 - .1 Angkatan Darat
 - .2 Angkatan Laut
 - .3 Angkatan Udara
- 326 Alusista
- 327 Bela Negara
- 328 Sarana dan Prasarana Militer
- 329 -
- 330 KEAMANAN
- 331 Kepolisian
 - .1 Polri
 - .2 Polisi Pamong Praja
 - .3 Polisi Hutan
 - .4 Polisi Khusus
 - .5 Polisi Wisata
- 332 Huru-Hara / Demonstrasi
- 333 Senjata Api Tajam
- 334 Bahan Peledak
- 335 Perjudian
- 336 Surat-Surat Kaleng

- 337 Pengaduan
- 338 Himbauan / Larangan tentang Keamanan dan Ketertiban
- 339 Terorisme
- 340 PERTAHANAN SIPIL
 - Kebijakan pemerintah mengenai pembentukan Mawil dan Matrik
 - .1 Hansip
 - .11 Pengangkatan / Pemberhentian Anggota Hansip
 - .12 Pengerahan dan Pengendalian Hansip
 - .13 Kegiatan Pelaksanaan Matrik Hansip dan Menwa
 - .14 Pembinaan Anggota Hansip/Linmas
 - .15 Penghargaan Anggota Hansip
 - .16 Hansip/Linmas Lanjut Usia
 - .17 Data Matrik Hansip dan Menwa
 - .18 Pendidikan/latihan Hansip dan Menwa
 - .19 Latihan Keterampilan Pamswakarsa
 - .2 Orientasi Kesadaran Bela Negara bagi Tokoh Masyarakat
 - .21 Orientasi Kesadaran Bela Negara Bagi Tokoh
 - .22 Pemberian Tali Asih Bagi Anggota
- 341 Perlindungan Sipil
- 342 Latihan Dasar
- 343 Suskalak A
- 344 Suskalak B
- 345 Suspim
- 346 Suskapim
- 347 -
- 348 -
- 349 -
- 350 KEJAHATAN
- 351 Makar / Pemberontak
- 352 Pembunuhan
- 353 Penganiayaan, Pencurian
 - .1 Bunuh diri
 - .2 Keracunan
- 354 Subversi / Penyelundupan / Narkotika
- 355 Pemalsuan
- 356 Korupsi / Penyelewengan / Penyalahgunaan Jabatan / KKN
- 357 Pemerkosaan / Perbuatan Cabul
- 358 Kenakalan
- 359 Kejahatan Lainnya
- 360 BENCANA
- 361 Gunung Berapi
- 362 Gempa
- 363 Angin Topan
- 364 Tanah Longsor
- 365 Kekeringan
- 366 Banjir
- 367 Kebakaran
 - .1 Pemadam Kebakaran
- 368 Tsunami
- 369 Rob (banjir laut)
- 370 KECELAKAAN
- 371 Darat
- 372 Udara
- 373 Laut
- 374 Sungai / Danau
- 375 Kecelakaan Lainnya

376	-
377	-
378	-
379	-
380	PENANGGULANGAN BENCANA
381	-
382	-
383	-
390	SEARCH AND RESEARCH (SAR)
391	-
392	-
393	-

400 KESEJAHTERAAN RAKYAT

- 400 KESEJAHTERAAN RAKYAT
- 401 Keluarga Pra Sejahtera
- 402 PNPM Mandiri Pedesaan
- 403 Subsidi
- 404 Program Raskin
- 405 Bantuan Langsung Tunai
- 406 Jaminan Sosial
- 407 Corporate Social Responsibility
- 408 -
- 409 -
- 410 PEMBANGUNAN DESA
- 411 Pembinaan Usaha Gotong Royong
 - .1 Swadaya Gotong Royong
 - .11 Penataan Gotong Royong
 - .12 Gotong Royong Dinamis
 - .13 Gotong Royong Statis
 - .14 Pungutan
 - .2 Lembaga Sosial Desa (LSD)
 - .21 Pembinaan
 - .22 Klasifikasi
 - .23 Proyek
 - .24 Musyawarah
 - .3 Latihan Kerja Masyarakat
 - .31 Kader Masyarakat
 - .32 Kuliah Kerja Nyata (KKN)
 - .33 Pusat Latihan
 - .34 Kursus-Kursus
 - .35 Kurikulum / Sylabus
 - .36 Keterampilan
 - .37 Pramuka
 - .4 Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
 - .41 Program
 - .42 Pembinaan Organisasi
 - .43 Kegiatan
 - .5 Penyuluhan
 - .51 Publikasi
 - .52 Peragaan
 - .53 Sosio Drama
 - .54 Siaran Pedesaan
 - .55 Penyuluhan Lapangan
 - .6 Kelembagaan Desa
 - .61 Kelompok Tani
 - .62 Rukun Tani
 - .63 Subak
 - .64 Dharma Tirta
- 412 Perekonomian Desa
 - .1 Produksi Desa
 - .11 Pengolahan
 - .12 Pemasaran
 - .2 Keuangan Desa
 - .21 Perkreditan Desa
 - .22 Inventarisasi Data
 - .23 Perkembangan / Pelaksanaan
 - .24 Bantuan / Stimulans

- .25 Petunjuk / Pembinaan Pelaksanaan
 - .3 Koperasi Desa
 - .31 Badan Usaha Unit Desa (BUUD)
 - .32 Koperasi Usaha Desa
 - .4 Penataan Bantuan Pembangunan Desa
 - .41 Jumlah Desa Yang Diberi Bantuan
 - .42 Pengarahan
 - .43 Pusat
 - .44 Daerah
 - .5 Alokasi Bantuan Pembangunan Desa
 - .51 Pusat
 - .52 Daerah
 - .6 Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa
 - .61 Bantuan Langsung
 - .62 Bantuan Keserasian
 - .63 Bantuan Juara Lomba Desa
- 413 Prasarana Desa
- 1 Prasarana Desa
 - .11 Pembinaan
 - .12 Bimbingan Teknis
 - .2 Pemukiman Kembali Penduduk
 - .21 Lokasi
 - .22 Diskusi
 - .23 Pelaksanaan
 - .3 Masyarakat Pradesa
 - .31 Pembinaan
 - .32 Penyuluhan
 - .4 Pemugaran Perumahan Dan Lingkungan Desa
 - .41 Rumah Sehat
 - .42 Proyek Perintis
 - .43 Pelaksanaan
 - .44 Pengembangan
 - .45 Perbaikan Kampung
- 414 Pengembangan Desa
- .1 Tingkat Perkembangan Desa
 - .11 Jumlah Desa
 - .12 Pemekaran Desa
 - .13 Pembentukan Desa Baru
 - .14 Evaluasi
 - .15 Bagan
 - .2 Unit Desa Kerja Pembangunan (UDKP)
 - .21 Penyuluhan Program
 - .22 Lokasi UDKP
 - .23 Pelaksanaan
 - .24 Bimbingan/Pembinaan
 - .25 Evaluasi
 - .3 Tata Desa
 - .31 Inventarisasi
 - .32 Penyusunan Pola Tata Desa
 - .33 Aplikasi Tata Desa
 - .34 Pemetaan
 - .35 Pedoman Pelaksanaan
 - .36 Evaluasi
 - .4 Perlombaan Desa
 - .41 Pedoman
 - .42 Penilaian

- .43 Kejuaraan
- .44 Piagam
- 415 Koordinasi
 - .1 Sektor Khusus
 - .2 Rapat Koordinasi Horizontal (RKH)
 - .3 Tim Koordinasi Pusat (TKP)
 - .4 Kerjasama
- .41 Luar Negeri (UNICEF)
- .42 Perguruan Tinggi
- .43 Kementerian / Lembaga Non Kementerian
- 416 -
- 417 -
- 418 -
- 419 -
- 420 PENDIDIKAN
 - .1 Pendidikan Khusus Klasifikasi Disini Pendidikan Putra/I Irja
- 421 Sekolah
 - .1 Pra Sekolah Pendidikan Usia Dini
 - .2 Sekolah Dasar
 - .3 Sekolah Menengah
 - .4 Sekolah Tinggi
 - .5 Sekolah Kejuruan
 - .6 Kegiatan Sekolah, Dies Natalis Lustrum
 - .7 Kegiatan Pelajar dan Mahasiswa
- .71 Reuni Darmawisata
- .72 Pelajar/Mahasiswa Teladan
- .73 Resimen Mahasiswa
 - .8 Sekolah Pendidikan Luar Biasa
 - .9 Pendidikan Luar Sekolah / Pemberantasan Buta Huruf
- 422 Administrasi Sekolah
 - Persyaratan Masuk Sekolah, Testing, Ujian, Pendaftaran, Mapras,
 - .1 Ospek
 - .2 Tahun Pelajaran
 - .3 Hari Libur
 - .4 Uang Sekolah, Klasifikasi Disini SPP
 - .5 Beasiswa
 - .6 Kurikulum
- 423 Metode Belajar
 - .1 Kuliah
 - .2 Ceramah, Simposium/Seminar
 - .3 Diskusi
 - .4 Kuliah Lapangan, Widyawisata, KKN, Studi Tur
 - .5 Kurikulum
 - .6 Karya Tulis
 - .7 Ujian
- 424 Tenaga Pengajar, Guru, Dosen, Dekan, Rektor
 - Klasifikasi Disini: Guru Teladan
- 425 Sarana Pendidikan
 - .1 Gedung
 - .11 Gedung Sekolah
 - .12 Kampus
 - .13 Pusat Kegiatan Mahasiswa
 - .14 Perputakaan
 - .15 Laboratorium
 - .2 Buku
 - .3 Perlengkapan Sekolah

- 426 Keolahragaan
 - .1 Cabang Olah Raga
 - .2 Sarana
 - .21 Gedung Olah Raga
 - .22 Stadion
 - .23 Lapangan
 - .24 Kolam renang
 - .3 Pesta Olah Raga, Klasifikasi Disini: PON, Porsade, Olimpiade, dsb
 - .4 KONI
- 427 Kepemudaan Meliputi: Organisasi Dan Kegiatan Remaja
Klasifikasi Disini: Gelanggang Remaja/Gelanggang Generasi Muda
- 428 Kepramukaan
- 429 Pendidikan Kedinasan
- 430 KEBUDAYAAN
- 431 Kesenian
 - .1 Cabang Kesenian
 - .2 Sarana Kesenian
 - .3 Prasarana
 - .31 Gedung Kesenian
 - .32 Padepokan
 - .4 Usaha Pertunjukan
- 432 Kepurbakalaan
 - .1 Museum
 - .2 Peninggalan Kuno
 - .21 Candi Termasuk Pemugaran
 - .22 Benda
- 433 Sejarah dan Nilai Tradisional
- 434 Bahasa
 - .1 Bahasa Indonesia
 - .2 Bahasa Daerah
 - .3 Bahasa Asing
- 435 Usaha Pertunjukan, Hiburan, Kesenangan
 - .1 Upacara Adat
 - .2 Pakaian Adat
 - .3 Rumah Adat
- 436 Kepercayaan
- 437 Adat Tradisional, Pelestarian dan Revitalisasi Kebudayaan
- 438 Perlindungan Kebudayaan
- 439 Kearifan Lokal Kesenian
- 440 KESEHATAN
- 441 Pembinaan Kesehatan
 - .1 Gizi
 - .2 Mata
 - .3 Jiwa
 - .4 Penyakit Dalam, Kanker
 - .5 Usaha Kegiatan Sekolah (UKS)
 - .6 Perawatan
 - .7 Penyuluhan Kesehatan Masyarakat (PKM)
 - .8 Pekan Imunisasi Nasional
- 442 Obat-obatan
 - .1 Pengadaan
 - .2 Penyimpanan
- 443 Penyakit Menular
 - .1 Pencegahan
 - .2 Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Menular Langsung (P2ML)
 - .21 Kusta

- .22 Kelamin
- .23 Frambosia
- .24 TBC / AIDS / HIV
 - .3 Epidemiologi dan Karantina (Epidka)
- .31 Kholera
- .32 Imunisasi
- .33 Surveilense
- .34 Rabies (Anjing Gila) Antraks
 - Pemberantasan & Pencegahan Penyakit Menular Sumber Binatang
 - .4 (P2B)
- .41 Malaria
- .42 Dengue Faemorrhagic Fever (Demam Berdarah HDF)
- .43 Filaria
- .44 Serangga
- .45 Antraks
- .46 Flu Burung
 - .5 Sanitasi
 - Tempat-tempat Pembuatan Dan Penjualan Makanan dan Minuman
 - .51 (TPPMM)
- .52 Sarana Air Minum Dan Jamban Keluarga (Samijaga)
- .53 Pestisida
- .54 Pencemaran Lingkungan
 - .6 Hygiene
- .61 A.Pektoris
- .62 IMA
- .63 Hipertensi
- .64 Stroke
- .65 Diabetes Militus (DM)
- .66 CA.Service
- .67 CA.Mammae
- .68 CA.Hepak
- .69 CA.Paru
 - .7 Dekopensatiokordis
- .71 PPOM
- .72 Asma
- .73 Kecelakaan Lalu Lintas
- .74 Psikosis
- 444 Gizi
 - .1 Kekurangan Makanan Bahaya Kelaparan, Busung Lapar
 - .2 Keracunan Makanan
 - .3 Menu Makanan Rakyat
 - .4 Badan Perbaikan Gizi Daerah (BPGD)
 - .5 Program Makanan Tambahn Anak Sekolah (PMT-AS)
- 445 Rumah Sakit, Keliling, Poliklinik
 - .1 RSUP
 - .2 Rumah Sakit Jiwa
 - .3 Rumah Sakit Mata
 - .4 Puskesmas
 - .5 Balai Kesehatan
 - .6 Balai Kesehatan Ibu dan Anak
 - .7 Rumah Sakit Bersalin
 - .8 Posyandu
 - .9 Rumah Sakit Paru
- 446 Tenaga Medis/Paramedis
- 447 Alat Medis
 - .1 Pengadaan Alat Kesehatan

- .2 Penyimpanan Alat Kesehatan
- .3 Standarisasi Alat Kesehatan
- .4 Penghapusan Alat Kesehatan
- 448 Pengobatan Tadisional
 - .1 Pijat
 - .2 Tusuk Jarum
 - .3 Jamu Tradisional
 - .4 Dukun / Paranormal
- 449 Apotik/Toko Obat
 - .1 Surat Izin
 - .2 Surat Izin Kerja
- 450 AGAMA
- 451 Islam
 - .1 Peribadatan
 - .11 Sholat
 - .12 Zakat Fitrah
 - .13 Puasa
 - .14 MTQ
 - .15 Haji
 - .16 Umroh
 - .2 Rumah Ibadah
 - .3 Tokoh Agama
 - .4 Pendidikan Agama
 - .41 Tinggi
 - .42 Menengah
 - .43 Dasar
 - .44 Pondok Pesantren
 - .45 Gedung Sekolah
 - .46 Tenaga Pengajar
 - .47 Buku Agama
 - .48 Dakwah
 - .49 Organisasi / Lembaga Pendidikan
 - .5 Harta Agama Wakaf, Baitulmal, dsb
 - .6 Peradilan Agama
 - .7 Organisasi Keagamaan Bukan Politik Majelis Ulama
 - .8 Mazhab
- 452 Protestan
 - .1 Peribadatan
 - .2 Rumah Ibadah
 - .2 Tokoh Agama, Rohaniawan, Pendeta, Domine
 - .4 Mazhab
 - .5 Organisasi Gerejani
- 453 Katolik
 - .1 Peribadatan
 - .2 Rumah Ibadah
 - .3 Tokoh Agama, Rohaniawan, Pendeta, Pastor
 - .4 Mazhab
 - .5 Organisasi Gerejani
- 454 Hindu
 - .1 Peribadatan
 - .2 Rumah Ibadah
 - .3 Tokoh Agama, Rohaniawan
 - .4 Mazhab
 - .5 Organisasi Keagamaan
- 455 Budha
 - .1 Peribadatan

- .2 Rumah Ibadah
- .3 Tokoh Agama, Rohaniawan
- .4 Mazhab
- .5 Organisasi Keagamaan
- 456 Urusan Haji
 - .1 ONH
 - .2 Manasik
- 457 -
- 458 -
- 458 -
- 460 SOSIAL
- 461 Rehabilitasi Penderita Cacat
 - .1 Cacat Mata
 - .2 Cacat Tubuh
 - .3 Cacat Mental
 - .4 Bisul/Tuli
- 462 Tuna Sosial
 - .1 Gelandangan
 - .2 Pengemis
 - .3 Tuna Susila
 - .4 Anak Nakal
- 463 Kesejahteraan Anak / Keluarga
 - .1 Anak Putus Sekolah
 - .2 Ibu Teladan
 - . 3 Anak Asuh
- 464 Pembinaan Pahlawan
 - Pahlawan Meliputi: Penghargaan Kepada Pahlawan, Tunjangan Kepada
 - .1 Pahlawan Dan Jandanya
 - Perintis Kemerdekaan Meliputi: Pembinaan, Penghargaan Dan
 - .2 Tunjangan Kepada Perintis
 - .3 Cacat Veteran
- 465 Kesejahteraan Sosial
 - .1 Lanjut Usia
 - .2 Korban Kekacauan, Pengungsi, Repatriasi
- 466 Sumbangan Sosial
 - .1 Korban Bencana
 - .2 Pencarian Dana Untuk Sumbangan
 - .3 Meliputi: Penyelenggaraan Undian, Ketangkasan, Bazar, dsb
 - .4 Panti Asuhan
 - .5 Panti Jompo

- 467 Bimbingan Sosial
 - Masyarakat Suku Terasing Meliputi: Bimbingan, Pendidikan,
 - .1 Kesehatan, Pemukiman
- 468 PMI
- 469 Makam
 - .1 Umum
 - .2 Pahlawan Dan Jandanya
 - .3 Khusus Keluarga Raja
 - .4 Krematorium
- 470 KEPENDUDUKAN
- 471 Pendaftaran Penduduk
 - .1 Identitas Penduduk
 - .11 Biodata
 - .12 Nomor Induk Kependudukan

- .13 Kartu Tanda Penduduk
 - .14 Kartu Keluarga
 - .15 Advokasi Identitas Penduduk
 - .2 Perpindahan Penduduk Dalam Wilayah Indonesia
 - .21 Perpindahan Penduduk WNI
 - .22 Perpindahan Penduduk WNA Dalam Wilayah Indonesia
 - .23 Perpindahan Penduduk WNA dan WNI Tinggal Sementara
 - .24 Daerah Terbelakan
 - .25 Bedol Desa
 - .3 Perpindahan Penduduk Antar Negara
 - .31 Penduduk Indonesia Ke Luar Negeri
 - .32 Orang Asing Tinggal Sementara
 - .33 Orang Asing Tinggal Tetap
 - Perpindahan Penduduk Antar Negara Di Wilayah Pembatasan Antar
 - .34 Negara (Pelintas Batas Tradisional)
 - .4 Pendaftaran Pengungsi Dan Penduduk Rentan
 - .41 Akibat Bencana Alam
 - .42 Akibat Kerusakan Sosial
 - .43 Pendaftaran Penduduk Daerah Terbelakang
 - .44 Pendaftaran Penduduk Rentan
- 472 Pencatatan Sipil
- .1 Kelahiran, Kematian Dan Advokasi
 - .11 Kelahiran
 - .12 Kematian
 - .13 Advokasi Kelahiran Dan Kematian
 - .2 Perkawinan, Perceraian Dan Advokasi
 - .21 Perkawinan Agama Islam
 - .22 Perkawinan Agama Non Islam
 - .23 Perceraian Agama Islam
 - .24 Perceraian Agama Non Islam
 - .25 Advokasi Perkawinan Dan Perceraian
 - Pengangkatan, Pengakuan, Dan Pengesahan Anak Serta Perubahan
 - .3 Dan Pembatalan Akta Dan Advokasi
 - Pengangkatan Anak
 - .31 Pengangkatan Anak
 - .32 Pengakuan Anak
 - .33 Pengesahan Anak
 - .34 Perubahan Anak
 - .35 Pembatalan Anak
 - Advokasi Pengurusan Pengangkatan, Pengakuan Dan Pengesahan Anak
 - .36 Serta Perubahan Dan Pembatalan Akta
- .4 Pencatatan Kewarganegaraan
 - .41 Akibat Perkawinan
 - .42 Akibat Kelahiran
 - .43 Non Perkawinan
 - .44 Non Kelahiran
 - .45 Perubahan WNI ke WNA
- 473 Informasi Kependudukan
- .1 Teknologi Informasi
 - .11 Perangkat Keras
 - .12 Perangkat Lunak
 - .13 Jaringan Komunikasi Data
 - .2 Kelembagaan Dan Sumber Daya Informasi
 - .21 Daerah Maju
 - .22 Daerah Berkembang
 - .23 Daerah Terbelakang

- .3 Pengolahan Data Kependudukan
- .31 Pendaftaran Penduduk
- .32 Kejadian Vital Penduduk
- .33 Penduduk Non Registrasi
- .4 Pelayanan Informasi Kependudukan
- 41 Media Elektronik
- .42 Media Cetak
- .43 Outlet
- 474 Perkembangan Penduduk
 - .1 Pengarahan Kuantitas Penduduk
 - .11 Struktur Jumlah
 - .12 Komposisi
 - .13 Fertilitas
 - .14 Kesehatan Reproduksi
 - .15 Morbiditas Penduduk
 - .16 Mortalitas Penduduk
 - .2 Pengembangan Kuantitas Penduduk
 - .21 Anak dan Remaja
 - .22 Penduduk Usia Produktif
 - .23 Penduduk Lanjut Usia
 - .24 Gender
 - .3 Penataan Persebaran Penduduk
 - .31 Migrasi Antar Wilayah
 - .32 Migrasi Internasional
 - .33 Urbanisasi
 - .34 Sementara
 - .35 Migrasi Non Permanen
 - .4 Perlindungan Pemberdayaan Penduduk
 - .41 Pengembangan Sistem Pelindungan Penduduk
 - .42 Pelayanan Kelembagaan Ekonomi
 - .43 Pelayanan Kelembagaan Sosial Budaya
 - .44 Partisipasi Masyarakat
 - .5 Pengembangan Wawasan Kependudukan
 - .51 Pendidikan Jalur Sekolah
 - .52 Pendidikan Jalur Luar Sekolah
 - .53 Pendidikan Jalur Masyarakat
 - .54 Pembangunan Berwawasan Kependudukan
- 475 Proyeksi Dan Penyerasian Kebijakan Kependudukan
 - .1 Indikator Kependudukan
 - .11 Perumusan Penetapan Dan Pengembangan Indikator Kependudukan
 - .12 Pemanfaatan Indikator Kependudukan
 - .13 Sosialisasi Indikator Kependudukan
 - .2 Proyeksi Kependudukan
 - .21 Penyusunan Dan Pengembangan Proyeksi Kependudukan
 - .22 Pemanfaatan Proyeksi Kependudukan
 - 3 Analisis Dampak Kependudukan
 - .31 Penyusunan Dan Pengembangan
 - .32 Pemanfaatan Analisis Dampak Kependudukan
 - .4 Penyerasian Kebijakan Lembaga Non Pemerintah
 - .41 Lembaga Internasioanal
 - .42 Lembaga Masyarakat Dan Nirlaba
 - .43 Lembaga Usaha Swasta
 - .5 Penyerasian Kebijakan Lembaga Pemerintah
 - .51 Lembaga Pemerintah
 - .52 Pemerintah Provinsidan Kota
 - .53 Pemerintah Kabupaten

- .6 Analisis
- 476 Monitoring
- 477 Evaluasi
- 478 Dokumentasi
- 479 -
- 480 MEDIA MASSA
- 481 Penerbitan
 - .1 Surat Kabar
 - .2 Majalah
 - .3 Buku
 - .4 Penerjemahan
- 482 Radio
 - .1 RRI
 - .11 Siaran Pedesaan Jgn Diklasifikasikan Disini
 - .2 Non RRI
 - .3 Luar Negeri
- 483 Televisi
- 484 Film
- 485 Pers
 - .1 Kewartawanan
 - .2 Wawancara
 - .3 Informasi Nasional
- 486 Grafika
- 487 Penerangan
 - .1 Pameran Non Komersil
- 488 Operation Room
- 489 Hubungan Masyarakat
- 490 Pengaduan Masyarakat
- 491 Surat Pembaca
- 492 -
- 493 -
- 494 -
- 495 -
- 496 -
- 497 -
- 498 -
- 499 -

500 PEREKONOMIAN

- 500 PEREKONOMIAN
 - .1 Dewan Stabilisasi
 - .2 Komisi Ekonomi
- 501 Pengadaan Pangan
- 502 Pengadaan Sandang
 - Perizinan Pada Umumnya Untuk Perizinan Suatu Bidang,
- 503 Kalsifikasikan Masalahnya
- 504 Ekonomi Makro
- 505 Ekonomi Mikro
- 506 Ekonomi Kerakyatan
- 507 -
- 508 -
- 509 -
- 510 PERDAGANGAN
 - Klasifikasikan Disini: Tata Niaga
 - .1 Promosi Perdagangan
 - .11 Pekan Raya
 - .12 Iklan
 - .13 Pameran Non Komersil
 - .14 Perlombaan (Lomba Desain, Busana, Kerajinan)
 - .15 Pasar
 - .16 Pertokoan, Kios, PKL
 - .2 Pelelangan
 - .21 Pemasaran Sembako
 - .22 Pemasaran Hasil Industri
 - .23 Penentuan Harga Pokok
 - .3 Bina Usaha dan Sarana Perdagangan
 - .31 Rencana dan Program Kerja
 - .32 Pelaksanaan Pelayanan Administrasi
 - .33 Pelaksanaan Teknis
 - .34 Pemantauan
 - .35 Evaluasi dan Pelaporan
 - .4 Perijinan
 - .41 Penerbitan SIUP
 - .42 Perpanganan
 - .43 Ijin Prinsip
 - .44 Rekomendasi
 - .5 Perdagangan Antar Pulau
 - .51 Kerjasama Bahan Baku
 - .52 Industri Pemasaran
 - .53 Kontrak
 - .6 Tera
 - .61 Tera Ulang Ukuran
 - .62 Takaran
 - .63 Timbangan
 - .64 Kalibrasi
 - .65 Cap Tanda Tera
 - .66 Biaya Tera
 - .7 Bantuan Peralatan
 - .71 Proposal
 - .72 Surat Perjanjian/kontrak
 - .73 Serah terima
 - .8 Perijinan/rekomendasi tanda pabrik
 - .9 Kemetrologian

- .91 Standar tingkat tiga
- .92 Standar Kerja satuan Ukuran
- .93 Standar Metrologi
- .931 Peralatan
- .932 Laboratorium Metrologi
- .933 Tanki Ukuran Mobil
- .934 Meter Tanki
- .935 Kwh Meter
- .936 SPBU
- 511 Pemasaran
 - .1 Sembilan Bahan Pokok, Tambahkan Kode Wilayah : Beras, Garam, Tanah, Minyak Goreng
 - .2 Pasar
 - .3 Pertokoan, Kaki Lima, Kios
- 512 Ekspor
 - .1 Ekspor Hasil Industri
 - .2 Ijin Ekspor
 - .3 Pengembangan Pasar Luar Negeri
 - .4 Manajemen Perdagangan Internasional
 - .41 Kebijakan
 - .42 Pemasarn
 - .5 Pemberitahuan Ekspor Barang
 - .6 Pengawasan Mutu Barang
 - .7 Eksportir Terdaftar
 - .8 Evaluasi dan Pelaporan
- 513 Impor
 - .1 Ijin Impor
 - .11 Pemberian Ijin
 - .12 Pengendalian Ijin
 - .2 Standar Mutu Dagang Impor
 - .3 Manajemen Perdagangan Internasional
 - .4 Kegiatan Impor
 - .41 Pembinaan Impor
 - .42 Pengendalian Impor
 - .43 Pemantauan Impor
 - .5 Faktor-Faktor Pendukung
 - .6 Pengawasan Mutu Barang Impor
 - .7 Penyaluran Kegiatan Impor
 - .71 Bahan Konsumsi
 - .72 Bahan Baku
 - .73 Bahan Penolong
 - .8 Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Impor
- 514 Perdagangan Antar Pulau
 - .1 Peti Kemas
 - .2 Kerjasama Bahan Baku
 - .3 Industri Pemasaran
 - .4 Kontrak
- 515 Perdagangan Luar Negeri
 - .1 Pengembangan Potensi Luar Negeri
 - .11 Promosi dan Informasi
 - .12 Pameran
 - .13 Kerjasama
- 516 Pergudangan
 - .1 Peti Kemas
 - .2 Tanki Penyimpanan
- 517 Aneka Usaha Perdagangan

- 518 Koperasi untuk BUUD, KUD lihat (412.31-412.32)
- 519 Metrologi
- 520 PERTANIAN
- 521 Tanaman Pangan
 - .1 Program
 - .11 Bimas / Inmas Termasuk Kredit
 - .12 Penyuluhan
 - .2 Produksi
 - .21 Padi / Panen
 - .22 Palawija
 - .23 Jagung
 - .24 Ketela Pohon / Ubi-Ubian
 - .25 Hortikultura
 - .26 Sayuran / Buah-Buahan
 - .27 Tanaman Hias
 - .28 Pembudidayaan Rumput Laut
 - .3 Saran Usaha Pertanian
 - .31 Peralatan Meliputi: Traktor Dan Peralatan Lainnya
 - .33 Pembibitan
 - .34 Pupuk
 - .4 Perlindungan Tanaman
 - .41 Penyakit, Penyakit Daun, Penyakit Batang
 - .42 Hama, Serangga, Wereng, Walang Sangit, Tungru, Tikus Dan Sejenisnya
 - .43 Pemberantasan Hama Meliputi: Penyemprotan, Penyiangan, Geropyokan, Sparayer, Pemberantasan Melalui Udara
 - .44 Pestisida
 - .5 Tanah Pertanian Pangan
 - .51 Persawahan
 - .52 Perladangan
 - .53 Kebun
 - .54 Rumpun Ikan Laut
 - .55 KTA/Lahan Kritis
 - .6 Pengusaha Petani
 - .7 Bina Usaha
 - .71 Pasca Panen
 - .72 Pemasaran Hasil
- 522 Kehutanan
 - .1 Program
 - .11 Hak Pengusahaan Hutan
 - .12 Tata Guna Hutan
 - .13 Perpetaan Hutan
 - .14 Tumpangsari
 - .2 Produksi
 - .21 Kayu
 - .22 Non Kayu
 - .3 Sarana Usaha Kehutanan
 - .4 Penghijauan, Reboisasi
 - .5 Kelestarian
 - .51 Cagar Alam, Marga Satwa, Suaka Marga Satwa
 - .52 Berburu Meliputi Larangan Dan Ijin Berburu
 - .53 Kebun Binatang
 - .54 Konservasi Lahan
 - .6 Penyakit/Hama
 - .7 Jenis-jenis Hutan

- .71 Hutan Hidup
- .72 Hutan Wisata
- .73 Hutan Produksi
- .74 Hutan Lindung
- 523 Perikanan
 - .1 Program
 - .11 Penyuluhan
 - .12 Teknologi
 - .2 Produksi
 - .21 Pelelangan
 - .3 Usaha Perikanan
 - .31 Pembibitan
 - .32 Daerah Penangkapan
 - .33 Pertambakan Meliputi: (Tambak Ikan Air Deras, Tambak Udang dll)
 - .34 Jaring Terapung
 - .4 Sarana
 - .41 Peralatan
 - .42 Kapal
 - .43 Pelabuhan
 - .5 Pengusaha
 - .6 Nelayan
 - .61 Perkampungan Nelayan
 - .62 Pelanggaran Kapal
 - .7 Data Perikanan
 - .8 Pelestarian Ikan
- 524 Peternakan
 - .1 Produksi
 - .11 Susu Ternak Rakyat
 - .12 Telur
 - .13 Daging
 - .14 Kulit
 - .2 Sarana Usaha Ternak
 - .21 Pembibitan
 - .22 Kandang Ternak
 - .3 Kesehatan Hewan
 - .31 Penyakit Hewan
 - .32 Pos Kesehatan Hewan
 - .33 Tesi Pullorum
 - .34 Karantina
 - .35 Pemberantasan Penyakit Hewan Termasuk Usaha Pencegahannya
 - .4 Perunggasan
 - .5 Pengembangan Ternak
 - .51 Inseminasi Buatan
 - .52 Pembibitan / Bibit Unggul
 - .53 Penyebaran Ternak
 - .6 Makanan Ternak
 - .7 Tempat Pematangan Hewan
 - .8 Data Peternakan
- 525 Perkebunan
 - .1 Program
 - .2 Produksi
 - .21 Karet
 - .22 The
 - .23 Tembakau
 - .24 Tebu
 - .25 Cengkeh

- .26 Kopra
- .27 Kopi
- .28 Coklat
- .29 Aneka Tanaman
 - .3 Pembibitan
- .31 Gulma
 - .4 Hama/Penyakit
- .41 Badra
 - .5 Pengolahan Lahan
- .51 Terasering
- 526 Ketahanan Pangan
 - .1 Program Bimbingan Masal
 - .2 Pengembangan Sarana Sumber daya
 - .21 Pembinaan Teknologi
 - .22 Sarana Produksi dan Permodalan
 - .23 Kelembagaan
 - .3 Agribisnis
 - .31 Mutu Hasil
 - .32 Pengolahan Hasil Pangan
 - .33 Kemitraan
 - .4 Distribusi Pangan
 - .41 Sistem dan Pola Distribusi
 - .42 Sarana dan Prasarana Distribusi
 - .43 Pengadaan dan Cadangan Pangan
 - .5 Kewaspadaan dan Keanekaragaman Pangan
 - .51 Rawan Pangan, Keamanan dan Mutu Pangan
 - .52 Pola Konsumsi Pangan Masyarakat
 - .53 Sistem Informasi Pangan
- 527 Pengembangan Ketahanan Pangan
 - .1 Kelembagaan dan Infrastruktur Pangan
 - .2 Distribusi Harga Pangan
 - .3 Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
 - .4 Konsumsi dan Keamanan Pangan
- 528 -
- 529 -
- 530 PERINDUSTRIAN
 - .08 Undang-Undang Gangguan
- 531 Industri Logam
- 532 Industri Mesin/Elektronik
- 533 Industri Kimia/Farmasi
- 534 Industri Tekstil
- 535 Industri Makanan / Minuman
- 536 Aneka Industri / Perusahaan
 - .1 Home Industri
- 537 Aneka Kerajinan
 - .1 Kerajinan Rakyat
- 538 Usaha Negara / BUMN
 - .1 Perjan
 - .2 Perum
 - .3 Persero / PT, CV
- 539 Perusahaan Daerah / BUMD/BULD
- 540 PERTAMBANGAN / KESAMUDRAAN
- 541 Minyak Bumi / Bensin
 - .1 Pengusahaan
- 542 Gas bumi
 - .1 Eksploitasi / Pengeboran

- .11 Kontrak Kerja
- .2 Penanganan, meliputi :Tangki, Pompa, Tanker
- 543 Aneka Tambang
 - .1 Timah
 - .2 Aluminium, Boksit
 - .3 Besi Termasuk Besi Tua
 - .4 Tembaga
 - .5 Batu Bara
- 544 Logam Mulia, Emas, Intan, Perak
- 545 Logam
- 546 Geologi
 - .1 Vulkanologi
 - .11 Pengawasan Gunung Berapi
 - .2 Sumur Artesis, Air Bawah Tanah
- 547 Hidrologi
- 548 Kesamudraan
- 549 Pesisir Pantai
- 550 PERHUBUNGAN
- 551 Perhubungan Darat
 - .1 Lalu Lintas Jalan Raya, Sungai, Danau
 - .11 Keamanan Lalu Lintas, Rambu-Rambu
 - .2 Angkutan Jalan Raya
 - .21 Perizinan
 - .22 Terminal
 - .23 Alat Angkutan
 - .24 Jembatan Timbang/lebih muatan
 - .3 Angkutan Sungai
 - .31 Perizinan
 - .32 Terminal
 - .33 Pelabuhan
 - .34 Keselamatan, Rambu-rambu
 - .35 Lalu Lintas
 - .36 Alur dan Kolam pelabuhan
 - .37 Trayek
 - .38 Sarana/Kapal
 - .39 Kecelakaan
 - .4 Angkutan Danau
 - .41 Perizinan
 - .42 Terminal
 - .43 Pelabuhan
 - .5 Feri
 - .51 Perizinan
 - .52 Terminal
 - .53 Pelabuhan
 - .6 Perkereta-Apian
 - .61 Sarana
 - .62 Signal
 - .63 Trayek
 - .64 Angkutan Penumpang
 - .65 Angkutan Barang
 - .66 Keselamatan
 - .67 Kecelakaan
 - .68 Perawatan/Perbaikan
 - .69 Perijinan
- 552 Perhubungan Laut
 - .1 Lalu Lintas Angkutan Laut, Pelayanan Umum

- .11 Keamanan Lalu Lintas, Rambu-Rambu
- .12 Pelayaran Dalam Negeri
- .13 Pelayaran Luar Negeri
 - .2 Perkapalan Alat Angkutan
- .21 Kapal Penumpang
- .22 Kapal Barang
- .23 Kapal Perang/Patroli/Negara
- 553 Perhubungan Udara
 - .1 Lalu Lintas Udara / Keamanan Lalu Lintas Udara
 - .2 Pelabuhan Udara
 - .3 Alat Angkutan
- 554 Pos
- 555 Telekomunikasi
 - .1 Telepon
 - .2 Telegram
 - .3 Telex / SSB
 - .4 Faximile
 - .5 Satelit
 - .6 Stasiun Bumi, Parabola
 - .7 Wartel
- 556 Pariwisata dan Rekreasi
 - .1 Izin Usaha Kepariwisataaan
 - .11 Izin Usaha Sarana Wisata
 - .12 Izin Usaha Objek dan Atraksi Wisata
 - .2 Wisatawan
 - .21 Wisatawan Mancanegara
 - .22 Wisatawan Nusantara
 - .3 Obyek Wisata dan Atraksi
 - .31 Obyek Wisata
 - Meliputi : Wisata Tirta, Situ, Marina Alam, Wisata Remaja dan Sosial, Wisata Konversi, Budaya dan Religius
 - .32 Atraksi
 - .321 Hiburan Umum
 - .4 Promosi Kepariwisataaan
 - .41 Sadar Wisata
 - .42 Mandala Swasta
 - .43 Tourism Information Centre
 - .44 Pameran Pariwisata Meliputi : Pekan Pariwisata dan Pata
 - .45 Taman Mini Indonesia Indah
 - .46 Bimas Pariwisata
 - .5 Perjalanan Wisata
 - .51 Biro Perjalanan
 - .52 Angkutan Wisata
 - .6 Pramuwisata
 - Meliputi : Pramuwisata Madya, Pramuwisata Muda, Pramuwirasata Khusus
 - .7 Fasilitas Wisatawan
 - .71 Hotel / Motel
 - .72 Losmen / Penginapan
 - .73 Penginapan Remaja
 - .74 Pondok Wisata
 - .75 Perkemahan
 - .76 Restoran, Bar dan Diskotik
 - .77 Rumah Makan
 - 557 Meteorologi
 - .1 Ramalan Cuaca

- .11 Curah Hujan
- .12 Kemarau
- 558 -
- 559 -
- 560 TENAGA KERJA
 - .1 Pengangguran
 - .2 Job Order TKI Ke Luar Negeri Oleh PJTKI
 - .3 Rekrutmen Calon TKI / TKW
 - .4 Seleksi Tenaga Kerja Ke Luar Negeri
 - .41 Pendaftaran dan Seleksi Calon TKI / TKW
 - .42 Berkas Persyaratan dan Hasil Cek Kesehatan
 - .43 Perlindungan Tenaga Kerja Pelayanan
 - .44 Perlindungan TKI / TKW
 - .5 Persyaratan TKI / TKW
 - .51 Permohonan Rekomendasi Pasport
 - .52 Perjanjian Kerja TKI / TKW Kartu
 - .53 Identitas Tenaga Kerja Indonesia (KITKI)
 - .54 Permohonan Fisikal Ke Luar Negeri
 - .55 Pelatihan TKI / TKW
 - .56 Perjanjian Kerja TKI dengan Pengguna
 - .57 Kurikulum Pelatihan TKLN
 - .58 Kualifikasi dan Kompetensi Infrastruktur TKLN
 - .59 Uji Kompetensi CTKI Oleh LSP dan BNSP
 - .6 Pemberangkatan
 - .61 Pemberangkatan Ke Luar Negeri
 - .62 Pembekalan Akhir Pemberangkatan TKI / TKW Ke Luar Negeri
 - .63 Berita Acara Serah Terima TKI / TKW
 - .7 Pemulangan Tenaga Kerja
 - .71 Kepulangan TKI/TKW Karena Kontraknya Habis
 - .72 Pemulangan TKI /TKW Ilegal
 - .73 TKI /TKW
 - .74 Pelayanan CTKI(Calon Tenaga Kerja Indonesia)
 - .75 Data dan Informasi Penempatan TKI
 - .76 Monitoring TKI
 - .77 TKI Bermasalah
 - .78 Bimbingan Pasca TKI
- 561 Upah
 - .1 Kegiatan Hasil dan Sidang Dewan Penelitian Pengupahan Daerah / Nasional
 - .2 Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Pembayaran Upah Minimum Kabupaten / Kota dan Provinsi
 - .3 Kebutuhan Fisik Minimum
 - .4 Perhitungan Upah Kerja (Termasuk di dalamnya upah Lembur)
 - .5 Laporan Data Remittance
 - .6 Pembayaran Gaji / Upah TKI /TKW
 - .7 Upah Minimum Kabupaten / Kota
- 562 Penempatan Tenaga Kerja, TKI
 - .1 Penempatan Tenaga Kerja, Penempatan Tenaga Kerja Mandiri (TKMT)
 - .11 Penempatan Tenaga Kerja Mandiri Profesional(TKMP)
 - .12 Penempatan Tenaga Kerja Non Terdidik dan Non Profesional, Pengembangan Kesempatan Berusaha / Perluasan Kerja
 - .2 Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)
 - .3 Lembaga Penyalur Tenaga Kerja
 - .31 Izin Pendirian Lembaga Penyalur Jasa Tenaga Kerja Lokal / Daerah Antar Kerja Negara
 - .32 Data Evaluasi Kinerja Penyalur Jasa Tenaga Kerja (PJTKI / BKS / BKK)

- .33 Pencabutan Izin Penyalur Jasa Tenaga Kerja(PJTKI / BKS / BKK)
- .4 Informasi Pasar Kerja
- .41 Bursa Pasar Kerja
- .5 Izin Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang
- .51 Antar Kerja Lokal
- .52 Antar Kerja Antar Daerah
- .53 Antar Kerja Antar Negara
- .54 Tenaga Kerja Antar Kerja Khusus(Wanita, Pemuda, Lansia, dan Penyandang Cacat)
- 563 Latihan Kerja
 - .1 Pendidikan Kerja
 - .11 Pendidikan dan Latihan Kerja
 - .12 Diklat di Dalam Negeri(PKL, Prakerin, OJT)
 - .13 Diklat di Luar Negeri(Pemasangan)
 - .2 Sarana dan Prasarana Latihan Kerja
 - .21 Tempat Pelatihan (BLK)
 - .22 Instruktur / Pelatih
 - .23 Modul / Silabus dan Bahan Praktek
 - .24 Kurikulum
 - .25 Sertifikat
 - .3 Kerjasama Pelatihan Kerja
 - .4 Produktivitas Tenaga Kerja
 - .5 Pemagangan Tenaga Kerja
 - .51 Diklat Pemagangan
 - .6 Standarisasi, Sertifikat dan Kompetensi
- 564 Tenaga Kerja
 - .1 Butsi
 - .2 Padat Karya
- 565 Perselisihan Perburuhan
 - .1 Perselisihan dan Perkara Hukum Tenaga Kerja
 - .11 Pengaduan Perkara Perburuhan
 - .12 Pemeriksaan Perkara
 - .13 Penyelidikan
 - .14 Sidang Perkara Perselisihan Buruh
 - .15 Hasil Putusan Sidang Perkara Perselisihan Buruh
 - .16 Peninjauan Kembali Hasil Putusan Sidang KP2K
 - .17 Permintaan Eksekusi Terhadap Hasil Putusan KP2K
 - .18 Daftar Usulan, Susulan dan Penetapan Anggota KP2K
 - .2 Pemogokan / Unjuk Rasa Tenaga Kerja
- 566 Keselamatan Kerja
 - .1 Instalasi Proteksi Kebakaran
 - .2 Pemakaian Alat Keselamatan Kerja
 - .3 Keterangan Kelayakan Atau Pelindung Diri (APD) dalam Kerja
 - .4 Pengangkatan dan Pembinaan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - .5 Pelatihan / Pembinaan Hyperkes dan Keselamatan Kerja
 - .6 Pengujian dan Hasil Pemriksaan Hyperkes
 - .7 Gangguan Lingkungan Tempat Usaha (Misal : Suara Bising, Limbah dll)
 - .8 Perlengkapan Sarana Kerja
 - .81 Pemasangan dan Pemakaian Lift (Pesawat Angkat/Angkut)
 - .82 Pemasangan dan Pemakaian Pesawat Uap (Ketel Uap)
 - .83 Pemasangan dan Pemakaian Motor Diesel
 - .84 Pemasangan dan Pemakaian Tanki tak Bertekanan
- 567 Pemutusan Hubungan Kerja
 - .1 Pengaduan PHK Seppihak
 - .2 PHK Massal
 - .3 Bantuan Hukum Bagi Pekerja Yang Di PHK

- .4 Ijin Melakukan PHK
- .5 Perhitungan Masa Kerja Bagi Pekerja Yang Di PHK
- .6 Pemberian Uang Tunggu Bagi Pekerja Yang di PHK
- .7 Pemberian Uang Pesangon Bagi Pekerja Yang di PHK
- 568 Kesejahteraan Buruh
 - .1 Bantuan Kredit/ Bantuan Modal Kerja Bagi Tenaga Kerja
- .11 Pemilihan Pekerja Teladan
 - .2 Perumahan Pekerja
 - .3 Keikutsertaan Pekerja Dalam Program Jamsostek
 - .4 Koperasi Pekerja
 - .5 Perpustakaan Pekerja
 - .6 Tempat Ibadah Pekerja
 - .7 Rekreasi dan Olah Raga Pekerja
 - .8 Lembaga Kerjasama Bipartit
- 569 Tenaga Kerja Orang Asing
 - .1 Rekomendasi Perpanjangan Ijin Kerja Tenaga Kerja Asing (IKTA)
 - .2 Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
 - .3 Kualifikasi Keahlian Tenaga Kerja Asing
 - .4 Perjanjian Dengan Negara Asing
 - .5 Data Tenaga Kerja Asing
 - .6 Kecelakaan/ Kematian Tenaga Kerja Asing, Perselisihan dan Pengaduan Tenaga Kerja asing
 - .7 Pemulangan Tenaga Kerja Asing
 - .8 Pemberdayaan dan Kontribusi Tenaga Kerja Asing
 - .9 Tenaga Kerja Asing Ilegal
- 570 PERMODALAN
- 571 Modal Domestik
- 572 Modal Asing
 - .1 Kerjasama Penanaman Modal Antar Provinsi
 - .2 Kerjasama Penanaman Modal Antar Kabupaten/Kota
- 573 Modal Patungan (Joint Venture) / Penyertaan Modal
- 574 Pasar Uang Dan Modal
- 575 Saham
- 576 Belanja Modal
- 577 Modal Daerah
- 578 Bursa Efek
- 579 Obligasi
- 580 PERBANKAN / MONETER
- 581 Kredit
- 582 Investasi
- 583 Pembukaan ,Perubahan, Penutupan Rekening, Deposito
 - .1 Deposito
 - .2 Tabanas
 - .3 Rekening
 - .4 Hadiah Tabungan
- 584 Bank Pembangunan Daerah/Lembaga Perbankan
 - .1 Bank Pemerintah
 - .2 Lembaga Perbankan Daerah
- .21 Lembaga Keuangan Kecamatan
- .22 BPR
- .3 Bank Swasta
- .4 Bank Syariah
- 585 Asuransi Dana Kecelakaan dan Lalu Lintas
 - .1 Polis
 - .2 Premi
 - .3 Tertanggung/Pemegang Polis

- .4 Uang Pertanggungan
- 586 Alat Pembayaran, Cek, Giro, Wesel, Transfer
- 587 Fiskal
- 588 Hutang Negara
- 589 Moneter
- 590 AGRARIA
- 591 Tataguna Tanah
 - .1 Pemetaan dan Pengukuran
 - .2 Perpetaan
 - .3 Penyediaan Data, Peta dan Publikasi
 - .4 Fatwa Tata Guna Tanah
 - .5 Tanah Kritis
- 592 Landreform
 - .1 Redistribusi
 - .11 Pendaftaran Pemilikan Dan Pengurusan Tanah Pertanian
 - .12 Penentuan Tanah Obyek Landreform
 - .13 Pembagian Tanah Obyek Landreform
 - .14 Sengketa Redistribusi Tanah Obyek Landreform
 - .2 Ganti Rugi
 - .21 Ganti Rugi Tanah Kelebihan
 - .211 Sengketa Ganti Rugi Tanah Kelebihan
 - .22 Ganti Rugi Tanah Absentee
 - .23 Ganti Rugi Tanah Partikelir
 - .3 Bagi Hasil
 - .31 Penetapan Imbangan Bagi Hasil
 - .32 Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil
 - .33 Sengketa Perjanjian Bagi Hasil
 - .4 Gadai Tanah
 - .41 Pendaftaran Pelaksanaan Gadai Tanah
 - .42 Pelaksanaan Gadai Tanah
 - .43 Sengketa Gadai Tanah
 - .5 Bimbingan dan Penyuluhan
 - .6 Pengembangan
 - .7 Yayasan Dana Landreform
 - 593 Pengurusan Hak-Hak Tanah
 - .1 Sewa Tanah
 - Sewa Tanah Untuk Tanaman Tertentu, Tebu, Tembakau, Rosela,
 - .11 Chorcorus
 - .2 Hak Milik
 - .21 Perorangan
 - .22 Badan Hukum
 - .3 Hak Pakai
 - .31 Perorangan
 - .311 Warga Negara Indonesia
 - .312 Warga Negara Asing
 - .32 Badan Hukum
 - .321 Badan Hukum Indonesia
 - .322 Badan Hukum Asing, Kedutaan, Konsulat Kantor Dagang Asing
 - .33 Tanah Gedung-Gedung Negara
 - .4 Guna Usaha
 - .41 Perkebunan Besar
 - .42 Perkebunan Rakyat
 - .43 Peternakan
 - .44 Perikanan
 - .45 Kehutanan
 - .5 Hak Guna Bangunan

- .51 Perorangan
- .52 Badan Hukum
 - .6 Hak Pengelolaan
- .61 PN Perumnas, Bonded Ware House, Industrial Estate, Real Estate
- .62 Perusahaan Daerah Pembangunan Perumahan
 - .7 Sengketa
- .71 Peradilan Perkara Tanah (Lihat Juga 183)
 - .8 Pencabutan dan Pembebasan Tanah
- .81 Pencabutan Hak
- .82 Pembebasan Tanah
- .83 Ganti Rugi Tanah
- 594 Pendaftaran Tanah
 - .1 Pengukuran / Pemetaan
 - .11 Fotogrametri
 - .12 Terristris
 - .13 Triangulasi
 - .14 Peralatan
 - .2 Dana Pengukuran
 - .3 Sertifikat
 - .4 Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
- 595 Lahan Untuk Transmigrasi
 - .1 Tataguna Tanah
 - .2 Landreform
 - .3 Pengurusan Hak-Hak Tanah
 - .4 Pendaftaran Tanah
- 596 -
- 597 -
- 598 -
- 599 -

600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAKERJAAN

- 600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAKERJAAN
- 601 Tata Bangunan Konstruksi Dan Industri Konstruksi
- 602 Kontraktor Pemborong
 - .1 Tender
 - .2 Pennunjukan
 - .3 Prakuafikasi
 - .31 Daftar Rekanan Mampu (DRM)
 - .32 Tanda Daftar Rekanan
- 603 Arsitektur
- 604 Bahan Bangunan
 - .1 Tanah Dan Batu Seperti: Batu Belah, Steen Slaag, Split dsb
 - .2 Aspal, Aspal Buatan, Aspal Alam (butas)
 - .3 Besi Dan Logam Lainnya
 - .31 Besi Beton
 - .32 Besi Profil (Kontruksi)
 - .33 Baja
 - .34 Paku
 - .35 Alumunium, Profil
 - .4 Bahan-Bahan Pelindung Dan Pengawet (Cat, Tech Til, Pengawet Kayu)
 - .5 Semen
 - .6 Kayu
 - .7 Bahan Penutup Atap (Genting, Asbes Gelombang, Seng Dan Sebagainya)
 - .8 Alat-Alat Penggantung Dan Pengunci
 - .9 Bahan-Bahan Bangunan Lainnya
- 605 Instalasi
 - .1 Instalasi Bangunan
 - .2 Instalasi Listrik
 - .3 Instalasi Air Sanitasi
 - .4 Instalasi Pengatur Udara
 - .5 Instalasi Akustik
 - .6 Instalasi Cahaya / Penerangan
- 606 Konstruksi Pencegahan
 - .1 Konstruksi Pencegahan Terhadap Kebakaran
 - .2 Konstruksi Pencegahan Terhadap Gempa
 - .3 Konstruksi Penegahan Terhadap Angin Udara/Panas
 - .4 Konstruksi Pencegahan Terhadap Kegaduhan
 - .5 Konstruksi Pencegahan Terhadap Gas/Explosive
 - .6 Konstruksi Pencegahan Terhadap Serangga
 - .7 Konstruksi Pencegahan Terhadap Radiasi Atom
- 607 -
- 608 -
- 609 -
- 610 PENGAIRAN
- 611 Irigasi
 - .1 Bangunan Waduk
 - .11 Bendungan
 - .12 Tanggul
 - .13 Pelimpahan Banjir
 - .14 Menara Pengambilan
 - .2 Bangunan Pengambilan
 - .21 Bendungan
 - .22 Bendungan Dengan Pintu Bilas
 - .23 Bendungan Dengan Pompa

- .24 Pengambilan Bebas
- .25 Pengambilan Bebas Dengan Pompa
- .26 Sumur Dengan Pompa
- .27 Kantung Lumpur
- .28 Slit Ekstrator
- .29 Escape Channel
- .3 Bangunan Pembawa
- .31 Saluran
- .311 Saluran Induk
- .312 Saluran Sekunder
- .313 Suplesi
- .314 Tersier
- .315 Saluran Kwarter
- .316 Saluran Pasangan
- .317 Saluran Tertutup / Terowongan
- .32 Bangunan
- .321 Bangunan Bagi
- .322 Bangunan Bagi Dan Sadap
- .323 Bangunan Sadap
- .324 Bangunan Check
- .325 Bangunan Terjun
- .33 Box Tersier
- .34 Got Miring
- .35 Talang
- .36 Syphon
- .37 Gorong-Gorong
- .38 Pelimpah Samping
- .4 Bangunan Pembuang
- .41 Saluran
- .411 Saluran Pembuang Induk
- .412 Saluran Pembuang Sekunder
- .413 Saluran Tersier
- .42 Bangunan
- .421 Bangunan Outlet
- .422 Bangunan Terjun
- .423 Bangunan Penahan Banjir
- .43 Gorong-Gorong Pembuang
- .44 Talang Pembuang
- .45 Syphon Pembuang
- .5 Bangunan Lainnya
- .51 Jalan
- .511 Jalan Inspeksi
- .512 Jalan Logistik Waduk Lapangan
- .52 Jembatan
- .521 Jembatan Inspeksi
- .522 Jembatan Hewan
- .53 Tangga Cuci
- .54 Kubangan Kerbau
- .55 Waduk Lapangan
- .56 Bangunan Penunjang
- .57 Jaringan Telepon
- .58 Stasiun Agro
- 612 Folder
- .1 Tanggul Keliling
- .11 Tanggul
- .12 Bangunan Penutup Sungai

- .13 Jembatan
 - .2 Bangunan Pembawa
 - .21 Saluran
 - .211 Saluran Muka
 - .212 Saluran Pembawa Waduk
 - .213 Saluran Pembawa Sekunder
 - .22 Stasiun Pompa Pemasukan
 - .23 Bangunan Bagi
 - .24 Gorong-Gorong
 - .25 Syphon
 - .3 Bangunan Pembuang
 - .31 Stasiun Pompa Pembuang
 - .32 Saluran
 - .321 Saluran Pembuang Induk
 - .322 Saluran Pembuang Sekunder
 - .33 Pintu Air Pembuangan
 - .34 Gorong-Gorong Pembuangan
 - .35 Syphon Pembuangan
 - .4 Bangunan Lainnya
 - .41 Bangunan
 - .411 Bangunan Pengukur Air
 - .412 Bangunan Pengukur Curah Hujan
 - .413 Bangunan Gudang Stasiun Pompa
 - .414 Bangunan Listrik Stasiun Pompa
 - .42 Rumah Petugas Aksploitasi
- 613 Pasang Surut
 - .1 Bangunan Pembawa
 - .11 Saluran
 - .111 Saluran Pembawa Induk
 - .112 Saluran Pembawa Sekunder
 - .113 Saluran Pembawa Tersier
 - .114 Saluran penyimpanan air
 - .12 Bangunan Pintu Pemasukan
 - .2 Bangunan Pembuangan
 - .21 Saluran
 - .211 Saluran Pembuang Induk
 - .212 Saluran Pembuang Sekunder
 - .213 Saluran Pembuang Tersier
 - .214 Saluran Pengumpul Air/Penyimpanan Air
 - .22 Bangunan Pintu Pembuangan
 - .3 Bangunan Lainnya
 - .31 Kolam Lainnya/Pasang
 - .32 Saluran
 - .321 Saluran Lalu Lintas
 - .322 Saluran Muka
 - .33 Bangunan
 - .331 Bangunan Penangkis Kotoran
 - .332 Bangunan Pengukur Muka Air
 - .333 Bangunan Pengukur Curah Hujan
 - .34 Jalan
 - .35 Jembatan
 - 614 Pengendalian Sungai
 - .1 Bangunan Pengaman
 - .11 Tanggul Banjir
 - .12 Pintu Pengatur Banjir
 - .13 Klep Pengatur Banjir

- .14 Tembok Pengaman Talud
- .15 Krib
- .16 Kantung Lumpur
- .17 Check-Dam
- .18 Syphon
 - .2 Saluran Pengaman
- .21 Saluran Banjir
- .22 Saluran Drainage
- 23 Corepure
 - .3 Bangunan Lainnya
- .31 Warning System
- .32 Stasiun
- .321 Stasiun Pengukur Curah Hujan
- .322 Stasiun Pengukur Air
- .323 Stasiun Pengukur Cuaca
- .324 Stasiun Pos Penjagaan
- 615 Pengamanan Pantai
 - .1 Tanggul
 - .2 Krib
 - .3 Bangunan Lainnya
- 616 Air Tanah
 - .1 Stasiun Pompa
 - .2 Bangunan Pembawa
 - .3 Bangunan Pembuang
 - .4 Bangunan Lainnya
- 617 -
- 618 -
- 619 -
- 620 JALAN
- 621 Jalan Kota
 - .1 Daerah Penguasaan
- .11 Tanah
- .12 Tanaman
- .13 Bangunan
 - .2 Bangunan Sementara
 - .3 Arteri Primer
 - .4 Kolektor Primer
 - .5 Lokal Primer
 - .6 Lingkungan Primer
- .21 Jalan Sementara
- .22 Jembatan Sementara
- .23 Kantor Proyek
- .24 Gedung Proyek
- .25 Barak Kerja
- .26 Laboratorium Lapangan
- .27 Rumah
 - .3 Badan Jalan
- .31 Pekerjaan Tanah (Earth Work)
- .32 Stabilisasi
 - .4 Perkerasan (Pavemen)
- .41 Lapis Pondasi Bawah
- .42 Lapis Pondasi
- .43 Lapis Permukaan
 - .5 Drainage
- .51 Parit Tanah
- .52 Gorong-Gorong (Culvert)

- .6 Buku Trotoir
- .61 Tanah
- .62 Perkerasan
- .63 Pasangan
- .7 Median
- .71 Tanah
- .72 Tanaman
- .73 Perkerasan
- .74 Pasangan
- .8 Daerah Samping
- .81 Tanaman
- .83 Pagar
- .9 Bangunan Pelengkap Dan Pengamanan
- .91 Rambu-Rambu/Tanda-Tanda Lalu Lintas
- .92 Lampu Penerangan
- .93 Lampu Pengatur Lalu Lintas
- .94 Patok-Patok KM
- .95 Patok-Patok ROW (Sempadan)
- .96 Rel Pengamanan
- .97 Pagar
- .98 Turap Penahan
- .99 Bronjong
- 622 Jalan Luar Kota
 - .1 Daerah Penguasaan
 - .11 Tanah
 - .12 Tanaman
 - .13 Bangunan
 - .2 Bangunan Sementara
 - .21 Jalan Sementara
 - .22 Jembatan Sementara
 - .23 Kantor Proyek
 - .24 Gudang Proyek
 - .25 Barak Kerja
 - .26 Laboratorium Lapangan
 - .27 Rumah
 - .3 Badan Jalan
 - .31 Pekerjaan Tanah (Earth Work)
 - .32 Stabilisasi
 - .4 Perkerasan (Pavement)
 - .41 Lapis Pondasi Bawah
 - .42 Lapis Pondasi
 - .43 Lapis Permukaan
 - .5 Drainage
 - .51 Parit
 - .52 Gorong-Gorong (Culvert)
 - .53 Sub Drainage
 - .6 Buku Trotoir
 - .61 Tanah
 - .62 Perkerasan
 - .7 Median
 - .71 Tanah
 - .72 Tanaman
 - .73 Perkerasan
 - .74 Pasangan
 - .8 Daerah Samping
 - .81 Tanaman

- .82 Pagar
- . 9 Bangunan Pelengkap Dan Pengamanan
- . 91 Rambu-Rambu/Tanda-Tanda Lalu Lintas
- .92 Lampu Penerangan
- .93 Lampu Pengatur Lalu Lintas
- .94 Patok-Patok KM
- .95 Patok-Patok ROW (Sempadan)
- . 96 Rel Pengamanan
- .97 Pagar
- . 98 Turap Penahan
- .99 Bronjong
- 623 Pengaspalan
- 624 Pembetonan
- 625 Hotmix
- 626 Rigit/Bethon
- 627 -
- 628 -
- 629 -
- 630 JEMBATAN
- 631 Jembatan Pada Jalan Kota
 - .1 Daerah Penguasaan
 - .11 Tanah
 - .12 Tanaman
 - .13 Bangunan
 - . 2 Bangunan Sementara
 - .21 Jalan Sementara
 - . 22 Jembatan Sementara
 - . 23 Kantor Proyek
 - .24 Gudang Proyek
 - .25 Barak Kerja
 - .26 Laboratorium Lapangan
 - .27 Rumah
 - . 3 Pekerjaan Tanah (Earth Work)
 - .31 Galian Tanah
 - .32 Timbunan Tanah
 - .4 Pondasi
 - .41 Pondasi Kepala Jalan
 - .42 Pondasi Pilar
 - .43 Pondasi Angker
 - .5 Bangunan Bawah
 - .51 Kepala Jembatan
 - .52 Pilar
 - .53 Pilon
 - .54 Landasan
 - .6 Bangunan
 - .61 Gelagar
 - .62 Lantai
 - .63 Perkerasan
 - .64 Jalan Orang / Trotoar
 - .65 Sandaran
 - .66 Talang air
 - .7 Bangunan / Pengaman
 - .71 Turap Penahan
 - .72 Bronjong
 - .73 Strek Dam
 - .74 Kist Dam

- .75 Corepure
- .76 Krib
 - .8 Bangunan Pelengkap
- .81 Rambu-Rambu/Tanda-Tanda Lalu Lintas
- .82 Lampu Penerangan
- .83 Lampu Pengatur Lalu Lintas
- .84 Patok Pengaman
- .85 Patok ROW (Sempadan)
- .86 Pagar
 - .9 Sprit(Oprit)
- .91 Badan
- .92 Perkerasan
- .93 Drainage
- .94 Baku
- .95 Median
- 632 Jembatan Pada Jalan Luar Kota
 - .1 Daerah Penguasaan
 - .11 Tanah
 - .12 Tanaman
 - .13 Bangunan
 - .2 Bangunan Sementara
 - .21 Jalan Sementara
 - .22 Jembatan Sementara
 - .23 Kantor Proyek
 - .24 Gudang Proyek
 - .25 Barak Kerja
 - .26 Laboratorium Lapangan
 - .27 Rumah
 - .3 Pekerjaan Tanah
 - .31 Galian Tanah
 - .32 Timnunan Tanah
 - .4 Pondasi
 - .41 Pondasi Kepala Jembatan
 - .42 Pondasi Pilar
 - .43 Pondasi Angker
 - .5 Bangunan Bawah
 - .51 Kepala Jembatan
 - .52 Pilar
 - .53 Piloon
 - .54 Landasan
 - .6 Bangunan Atas
 - .61 Gelagar
 - .62 Lantai
 - .63 Perkerasan
 - .64 Jalan Orang / Trotoar
 - .65 Sandaran
 - .66 Talang Air
 - .7 Bangunan Pengaman
 - .71 Turap / Penahan
 - .72 Brojong
 - .73 Strek Dam
 - .74 Kist Dam
 - .75 Corepure
 - .76 Krib(kriup)
 - .8 Bangunan Pelengkap
 - .81 Rambu-Rambu/Tanda-Tanda Lalu Lintas

- .82 Lampu Penerangan
- .83 Lampu Pengatur Lalu Lintas
- .84 Patok Pengaman
- .85 Patok ROW (Sempadan)
- .86 Pagar
- .9 Oprit
- .91 Badan
- .92 Perkerasan
- .93 Drainage
- .94 Bahu
- .95 Median
- 633 -
- 634 -
- 635 -
- 636 -
- 637 -
- 638 -
- 639 -
- 640 BANGUNAN
- 641 Bangunan pemerintah
 - .1 Gedung Pengadilan
 - .2 Rumah Pejabat Negara
 - .3 Gedung DPR
 - .4 Gedung Balai Kota
 - .5 Penjara
 - .6 Perkantoran
 - .7 Gedung lainnya
- 642 Bangunan Pendidikan
 - .1 Taman Kanak-Kanak
 - .2 SD & SEKOLAH MENENGAH
 - .3 Perguruan Tinggi
- 643 Bangunan Rekreasi
 - .1 BANGUNAN OLAH RAGA
 - .2 Gedung Kesenian
 - .3 Gedung Pemancar
 - .4 Gedung lainnya
- 644 Bangunan Perdagangan
 - .1 Pusat Perbelanjaan
 - .2 Gedung Perdagangan
 - .3 Bank
 - .4 Pekantoran dll
- 645 Bangunan Pelayanan Umum
 - .1 Mandi,cuci,kakus(MCK) umum
 - .2 Gedung Parkir
 - .3 Rumah Sakit
 - .4 Gedung Telkom
 - .5 Terminal Angkutan udara
 - .6 Terminal Angkutan air
 - .7 Terminal Angkutan Darat
 - .8 Bangunan Keagamaan
 - .9 Bangunan lainnya
- 646 Bangunan Peninggalan Sejarah
 - .1 Monumen
 - .2 Candi
 - .3 Keraton
 - .4 Rumah Tradisional

- .5 Rumah lainnya
- 647 Bangunan Industri
- 648 Bangunan Tempat Tinggal
 - .1 Rumah Perkotaan
 - .11 Inti / Sederhana
 - .12 Sedang / Mewah
 - .2 Rumah Pedesaan
 - .21 Rumah Contoh
 - .3 Real Estate
 - .31 Rumah BTN
 - .32 Rumah Perumnas
- 649 Elemen Bangunan
 - .1 Pondasi
 - .11 Di Atas Tiang
 - .2 Dinding
 - .21 Penahan Beban
 - .22 Tidak Menahan Beban
 - .3 Atap
 - .31 Atap Genteng
 - .32 Atap Asbes
 - .33 Atap seng
 - .4 Lantai / Langit-Langit
 - .41 Suspended
 - .42 Solit
 - .5 Pintu / Jendela
 - .51 Pintu Harmonik
 - .52 Pintu Biasa
 - .53 Pintu Sorong
 - .54 Pintu Kayu
 - .55 Jendela Sorong
 - .56 Jendela Vertikal
- 650 TATA KOTA
- 651 Daerah Perdagangan / Pelabuhan
 - .1 Daerah Pusat Perbelanjaan
 - .2 Daerah Perkotaan
- 652 Daerah Pemerintah
- 653 Daerah Perumahan
 - .1 Kepadatan Rendah
 - .2 Kepadatan Tinggi
- 654 Daerah Industri
 - .1 Industri Berat
 - .2 Industri Ringan
 - .3 Industri Rumah (Home Industry)
- 655 Daerah Rekreasi
 - .1 Public Garden
 - .2 Sport & Playing Fields
 - .3 Open Space
- 656 Transportasi (Tata Letak)
 - .1 Jaringan Jalan
 - .11 Penerangan Jalan
 - .2 Jaringan Kereta Api
 - .3 Jaringan Sungai
- 657 Assaineering
 - .1 Saluran Pengumpulan
 - .2 saluran Pengolahan
- .21 Bangunan

- .211 Bangunan Penyaringan
- .212 Bangunan Penghancur Kotoran / Sampah
- .213 Bangunan Pengendap
- .214 Bangunan Pengering Lumpur
 - .22 Unit Densifektan
 - .23 Unit Perpompaan
- 658 Kesehatan Lingkungan
 - .1 Persampahan
 - .11 Bangunan Pengumpul
 - .12 Bangunan Pemusnahan
 - .2 Pengotoran Udara
 - .3 pengotoran Air
 - .31 Air Buangan Industri Limbah
 - .4 Kegaduhan
 - .5 Kebersihan Kota
- 659 -
- 660 TATA LINGKUNGAN
 - .1 Lingkungan hidup
 - .2 Kebersihan Lingkungan
 - .3 Pencemaran
 - .31 Pecemaran Air
 - .32 Pencemaran Udara
 - .33 Pencemaran limbah B3
- 661 Daerah Hutan
- 662 Daerah Pertanian
- 663 Daerah Pemukiman
- 664 Pusat Pertumbuhan
- 665 Transportasi
 - .1 Jaringan Jalan
 - .2 Jaringan Kereta Api
 - .3 Jaringan Sungai
- 666 -
- 667 -
- 668 -
- 669 -
- 670 KETENAGAAN
- 671 Listrik
 - .1 Kelistrikan
 - .11 Kelisrikan PLN
 - .12 Kelistrikan Non PLN
 - .2 Pembangkit Tenaga Listrik
 - .21 PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air)
 - .22 PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel)
 - .23 PLTG (Pembangkit Listrik Tenaga Gas)
 - .24 PLTM (Pembangkit Listrik Tenaga Matahari)
 - .25 PLTN (Pembangkit Istripk Tenaga Nuklir)
 - .26 PLTPB (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi)
 - .27 PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap)
 - .28 Pembangkit Listrik Tenaga Lainnya
 - .3 Transmisi Tenaga Listrik
 - 31 Gardu Induk/Gardu Penghubung/Gardu Trafo
 - .32 Saluran Udara Tegangan Tinggi
 - .33 Kabel Bawah Tanah
 - .34 Kabel Bawah Laut/air
 - .4 Distribusi Tenaga Listrik
 - .41 Gardu Distribusi

- .42 Tegangan Rendah
- .43 Tegangan Menengah
- .44 Tegangan Tinggi
- .45 Jaringan Bawah Tanah
- .5 Pengusahaan Listrik
- .51 Sambungan Listrik
- .52 Penjualan Tenaga Listrik
- .53 Tarif Listrik
- .54 Instalatur Listrik
- 672 Tenaga Air
- 673 Tenaga Minyak
- 674 Tenaga Gas
- 675 Tenaga Matahari
- 676 Tenaga Nuklir
- 677 Tenaga Panas Bumi
- 678 Tenaga Uap
- 679 Tenaga Lainnya
- 680 PERALATAN
- 681 Peralatan Berat
- 682 Peralatan Ringan
- 683 -
- 684 -
- 685 -
- 686 -
- 687 -
- 688 -
- 689 -
- 690 AIR MINUM
- 691 Intake
 - .1 Broncaptering
 - .2 Sumur
 - .21 Sumur pompa
 - .22 Sumur Artesis
 - .3 Bendungan
 - .4 Saringan (screen)
 - .5 Pintu air
 - .6 Saluran Pembawa
 - .7 Alat Ukur
 - .8 Perpompaan
- 692 Transmisi Air Baku
 - .1 Perpipaan
 - .2 Katup Udara (Air Relief)
 - .3 Katup Penguras (Blow Off)
 - .4 Bak Pelepas Tekanan
 - .5 Jembatan Pipa
 - .6 Syphon
- 693 Instalasi Pengelolaan
 - .1 Bangunan Ukur
 - .2 Bangunan Aerasi
 - .3 Bangunan Pengendapan
 - .4 Bangunan Penyuluh Bahan Kimia
 - .5 Bangunan Pengaduk
 - .6 Bangunan Saringan
 - .7 Perpompaan
 - .8 Clear Hell
- 694 Distribusi

- .1 Reservoir Menara Bawah Tanah
- .11 Menara
- .12 reservoir di Bawah Tanah
- .2 Perpipaan
- .3 Perpompaan
- .4 Jembatan Pipa
- .5 Syphon
- .6 Hydran
- .61 Hydran Umum
- .62 Hydran Kebakaran
- .7 Katup
- .71 Katup Udara (Air Relief)
- .72 Katup Pelepas (Blow Off)
- .8 Bak Pelepas Tekanan
- 695 Perusahaan Daerah Air Minum
- 696 -
- 697 -
- 698 -
- 699 -

700 PENGAWASAN

- 700 PENGAWASAN
- 701 Bidang Urusan Dalam
- 702 Bidang Peralatan
- 703 Bidang Kekayaan Daerah
- 704 Bidang Perpustakaan / Dokumentasi / Kearsipan/Sandi
- 705 Bidang Perencanaan
 - .1 Evaluasi
 - .2 Pelaporan
 - .3 Pengaduan
 - .4 Tindak Lanjut
- 706 Bidang Organisasi / Ketatalaksanaan
- 707 Bidang Penelitian
- 708 Bidang Konferensi
- 709 Bidang Perjalanan Dinas
- 710 BIDANG PEMERINTAHAN
- 711 Bidang Pemerintahan Pusat
- 712 Bidang Pemerintahan Provinsi
- 713 Bidang Pemerintahan Kabupaten / Kota
- 714 Bidang Pemerintahan Desa
- 715 Bidang MPR / DPR
- 716 Bidang DPRD Provinsi
- 717 Bidang DPR Kabupaten / Kota
- 718 Bidang Hukum
- 719 Bidang Hubungan Luar Negeri
- 720 BIDANG POLITIK
- 721 Bidang Kepartaian
- 722 Bidang Organisasi Kemasyarakatan
- 723 Bidang Organisasi Profesi Dan Fungsional
- 724 Bidang Organisasi Pemuda
- 725 Bidang Organisasi Buruh, Tani, Dan Nelayan
- 726 Bidang Organisasi Wanita
- 727 Bidang Pemilihan Umum
- 728 -
- 729 -
- 730 BIDANG KEAMANAN/KETERTIBAN
- 731 Bidang Pertahanan
- 732 Bidang Kemiliteran
- 733 Bidang Perlindungan Masyarakat
- 734 Bidang Kemanan
- 735 bidang Kejahatan
- 736 Bidang Bencana
- 737 Bidang Kecelakaan
- 738 -
- 739 -
- 740 BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
- 741 Bidang Pembangunan Desa
- 742 Bidang Pendidikan
- 743 Bidang Kebudayaan
- 744 Bidang Kesehatan
- 745 Bidang Agama
- 746 Bidang Sosial
- 747 Bidang Kependudukan
- 748 Bidang Media Massa
- 749 -

- 750 BIDANG PEREKONOMIAN
- 751 Bidang Perdagangan
- 752 Bidang Pertanian
- 753 Bidang Perindustrian
- 754 Bidang Pertambangan / Kesamudraan
- 755 Bidang Perhubungan
- 756 Bidang Tenaga Kerja
- 757 Bidang Permodalan
- 758 Bidang Perbankan / Moneter
- 759 Bidang Agraria
- 760 BIDANG PEKERJAAN UMUM
- 761 Bidang Pengairan
- 762 Bidang Jalan
- 763 Bidang Jembatan
- 764 Bidang Bangunan
- 765 Bidang Tata Kota
- 766 Bidang Lingkungan
- 767 Bidang Ketenagaan
- 768 Bidang Peralatan
- 769 Bidang Air Minum
- 770 -
- 771 -
- 772 -
- 773 -
- 774 -
- 775 -
- 776 -
- 777 -
- 778 -
- 779 -
- 780 BIDANG KEPEGAWAIAN
- 781 Bidang Pengadaan Pegawai
- 782 Bidang Mutasi Pegawai
- 783 Bidang Kedudukan Pegawai
- 784 Bidang Kesejahteraan Pegawai
- 785 Bidang Cuti
- 786 Bidang Penilaian
- 787 Bidang Tata Usaha Kepegawaian
- 788 Bidang Pemberhentian Pegawai
- 789 Bidang Pendidikan Pegawai
- 790 BIDANG KEUANGAN
- 791 Bidang Anggaran
- 792 Bidang Otorisasi
- 793 Bidang Verifikasi
- 794 Bidang Pembukuan
- 795 Bidang Perbendaharaan
- 796 Bidang Pembina Kebendaharaan
- 797 Bidang Pendapatan
- 798 -
- 799 Bidang Bendaharaan

800 KEPEGAWAIAN

- 800 KEPEGAWAIAN
 - Klasifikasi Disini: Kebijakan Kepegawaian
 - .1 Perencanaan
 - .2 Penelitian
 - .3 Pengaduan
 - .4 Tim
 - .5 Statistik
 - .6 Peraturan Perundang-Undangan
- 801 -
- 802 -
- 803 -
- 804 -
- 805 -
- 806 -
- 807 -
- 808 -
- 809 -
- 810 PENGADAAN
 - Meliputi: Lamaran, Pengujian Kesehatan, Dan Pengangkatan Calon Pegawai
- 811 Lamaran
 - .1 Testing
 - .2 Screening
 - .3 Panggilan
- 812 Pengujian Kesehatan
- 813 Pengangkatan Calon Pegawai
 - .1 Pengangkatan Calon Pegawai Golongan 1
 - .2 Pengangkatan Calon Pegawai Golongan II
 - .3 Pengangkatan Calon Pegawai Golongan III
 - .4 Pengangkatan Calon Pegawai Golongan IV
 - .5 Pengangkatan Calon Guru Inpres
- 814 Pengangkatan Tenaga Lepas
 - .1 Pengangkatan Tenaga Bulanan / Tenaga Kontrak
 - .2 Pengangkatan Tenaga Harian
 - .3 Pengangkatan Tenaga Pensiunan
- 815 -
- 816 -
- 817 -
- 818 -
- 819 -
- 820 MUTASI
 - Meliputi: Pengangkatan, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Pemindahan, Pelimpahan Datasering, Tugas Belajar Dan Wajib Militer
- 821 Pengangkatan
 - .1 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Tetap
 - .11 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Golongan 1
 - .12 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Golongan 2
 - .13 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Golongan 3
 - .14 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Golongan 4
 - .15 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Yang Cuti Di Luar Tanggungan Negara
 - .2 Pengangkatan Dalam Jabatan, Pembebasan Dari Jabatan, Berita Acara Serah Terima Jabatan
 - .21 Sekjen/Dirjen/Irjen/Kabag

- .22 Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Kepala Pusat/Sekretaris/Kepala Dinas/Asisten Sekwilda
- .23 Kepala Bagian/Kepala Sub Direktorat/Kepala Bidang/Inspektur Pembantu
- .24 Kepala Subbagian/Kepala Seksi/Kepala Sub Bidang/Pemeriksa
- .25 Residen/Pembantu Gubernur
- .26 Wedana/Pembantu Bupati
- .27 Camat
- .28 Lurah Administratif (Lurah Desa)
- .29 Jabatan Lainnya
- 822 Kenaikan Gaji Berkala
 - .1 Pegawai Golongan 1
 - .2 Pegawai Golongan 2
 - .3 Pegawai Golongan 3
 - .4 Pegawai Golongan 4
- 823 Kenaikan Pangkat / Pengangkatan
 - .1 Pegawai Golongan 1
 - .2 Pegawai Golongan 2
 - .3 Pegawai Golongan 3
 - .4 Pegawai Golongan 4
- 824 Pemindahan / Pelimpahan / Perbantuan
 - .1 Pegawai Golongan 1
 - .2 Pegawai Golongan 2
 - .3 Pegawai Golongan 3
 - .4 Pegawai Golongan 4
 - .5 Lolos Butuh
 - .6 Kurikulum dan Silabi
 - .7 Proposal (TOR)
- 825 Datasering dan Penempatan Kembali
- 826 Penunjukan Tugas Belajar
 - .1 Dalam Negeri
 - .2 Luar Negeri
 - .3 Tunjangan Belajar
 - .4 Penempatan Kembali
- 827 Wajib Belajar
- 828 Mutasi Dengan Instansi Lain
- 829 -
- 830 KEDUDUKAN
Meliputi: Perhitungan Masa Kerja, Penyesuaian Pangkat/Gaji, Penghargaan Ijasah, Dan Jenjang Pangkat
- 831 Perhitungan Masa Kerja
- 832 Penyesuaian Pangkat / Gaji
 - .1 Pegawai Golongan 1
 - .2 Pegawai Golongan 2
 - .3 Pegawai Golongan 3
 - .4 Pegawai Golongan 4
- 833 Penghargaan Ijazah / Penyesuaian
- 834 Jenjang Pangkat / Eselonering
- 835 -
- 836 -
- 837 -
- 838 -
- 839 -
- 840 KESEJAHTERAAN PEGAWAI
Meliputi: Tunjangan, Dana, Perawatan Kesehatan, Koperasi, Distribusi, Permahan/Tanah, Bantuan Sosial, Rekreasi Dan Dispensasi.

- 841 Tunjangan
 - .1 Jabatan
 - .2 Kehormatan
 - .3 Kematian/Uang Duka
 - .4 Tunjangan Hari Raya
 - .5 Perjalanan Dinas Tetap/Cuti/Pindah
 - .6 Keluarga
 - .7 Sandang, Pangan, Papan (Bapertarum)
- 842 Dana
 - .1 Taspen
 - .2 Kesehatan
 - .3 Asuransi
- 843 Perawatan Kesehatan
 - .1 Poliklinik
 - .2 Perawatan Dokter
 - .3 Obat-Obatan
 - .4 Keluarga Berencana
- 844 Koperasi / Distribusi
 - .1 Distribusi Pangan
 - .2 Distribusi Sandang
 - .3 Distribusi Papan
- 845 Perumahan/Tanah
 - .1 Perumahan Pegawai
 - .2 Tanah Kapling
 - .3 Losmen/Hotel
- 846 Bantuan Sosial
 - .1 Bantuan Kebakaran
 - .2 Bantuan Kebanjiran
- 847 -
- 848 -
- 849 -
- CUTI Meliputi Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Sakit, Cuti Hamil, Cuti
- 850 Naik Haji, Cuti
Diluar Tanggungan Negara Dan Cuti Alasan Lain
- 851 Cuti Tahunan
- 852 Cuti Besar
- 853 Cuti Sakit
- 854 Cuti Hamil
- 855 Cuti Naik Haji/Umroh
- 856 Cuti Di Luar Tangungan Neagara
- 857 Cuti Alasan Lain/Alasan Penting
- 858 -
- 859 -
- 860 PENILAIAN
Meliputi: Penghargaan, Hukuman, Konduite, Ujian Dinas, Penilaian
Kakayaan Pribadi Dan Rehabilitasi
- 861 Penghargaan
 - .1 Bintang/Satyalencana
 - .2 Kenaikan Pangkat Anumerta
 - .3 Kenaikan Gaji Istimewa
 - .4 Hadiah Berupa Uang
 - .5 Pegawai Teladan
- 862 Hukuman
 - .1 Teguran Peringatan
 - .2 Penundaan Kenaikan Gaji
 - .3 Penurunan Pangkat

- .4 Pemindahan
Catatan: Pemberhentian Untuk Sementara Waktu Dan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Lihat 887 Dan 888
- 863 Konduite, DP3, Disiplin Pegawai
- 864 Ujian Dinas
 - .1 Tingkat 1
 - .2 Tingkat 2
 - .3 Tingkat 3
- 865 Penilaian Kehidupan Pegawai Negeri
Meliputi: Petunjuk Pelaksanaan Hidup Sederhana, Penilaian Kekayaan Pribadi (LP2P)
- 866 Rehabilitasi / Pengaktifan Kembali
- 867 -
- 868 -
- 869 -
- 870 TATA USAHA KEPEGAWAIAN
Meliputi: Formasi, Bezetting, Registrasi, Daftar, Riwayat Hidup, Hak, Penggajian, Sumpah, /Janji Dan Korps Pegawai
- 871 Formasi
- 872 Bezetting/ Daftar Urut Kepegawaian
- 873 Registrasi
 - .1 NIP
 - .2 KARPEG
 - .3 Legitiminasi/ Tanda Pengenal
 - .4 Daftar Keluarga, Perkawinan, Perceraian, Karis, Karsu
- 874 Daftar Riwayat Pekerjaan
 - .1 Tanggal Lahir
 - .2 Penggantian Nama
 - .3 Izin kepartaian Organisasi
- 875 Kewenangan Mutasi Pegawai
 - .1 Pelimpahan Wewenang
 - .2 Specimen Tanda Tangan
- 876 Penggajian
 - .1 SKPP
- 877 Sumpah/Janji
- 878 Korps Pegawai
- 879 -
- 880 PEMBERHENTIAN PEGAWAI
Meliputi Atas Pemberhentian, Permintaan Sendiri, Dengan Hak Pensiun, Karena Meninggal Dunia, Alasan Lain, Dengan Diberi Uang Pesangon, Uang Tunggu Untuk Sementara Waktu Dan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
- 881 Permintaan Sendiri
- 882 Dengan Hak Pensiun
 - .1 Pemberhentian Dengan Hak Pensiun Pegawai Negeri Golongan 1
 - .2 Pemberhentian Dengan Hak Pensiun Pegawai Negeri Golongan 2
 - .3 Pemberhentian Dengan Hak Pensiun Pegawai Negeri Golongan 3
 - .4 Pemberhentian Dengan Hak Pensiun Pegawai Negeri Golongan 4
 - .5 Pensiun Janda / Duda
 - .6 Pensiun Yatim Piatu
 - .7 Uang Muka Pensiun
 - .8 Pensiun Dini
- 883 Karena Meninggal
 - .1 Karena Meninggal Dalam Tugas
- 884 Alasan Lain

- 885 Uang Pesangon
- 886 Uang Tunggu
- 887 Untuk Sementara Waktu
- 888 Tidak Dengan Hormat
- 889 -
- 890 PENDIDIKAN PEGAWAI
Meliputi: Perencanaan, Pendidikan Reguler, Pendidikan Non-Reguler, Pendidikan Ke Luar Negeri, Metode, Tenaga Pengajar, Administrasi Pendidikan, Fasilitas Sarana Pendidikan
- 891 Perencanaan
 - .1 Program
 - .2 Kurikulum dan Silabi
 - .3 Proposal (TOR)
- 892 Pendidikan _Egular / Kader
 - .1 IPDN / APDN
 - .2 Kursus-Kursus Reguler
- 893 Pendidikan dan Pelatihan / Non Reguler
 - .1 LEMHANAS
Pendidikan dan Pelatihan Struktural, SPATI, SPAMEN, SPAMA,
 - .2 ADUMLA, ADUM
 - .3 Kursus-Kursus / Penataran
 - .4 Diklat Tehnik, Fungsional Dan Manajemen Pemerintahan
 - .5 Diklat Lainnya
- 894 Pendidikan Luar Negeri
 - .1 Berkesinambungan / Berkala / Bergelar
 - .2 Non Gelar / Diploma
- 895 Metode
 - .1 Kuliah
 - .2 Ceramah, Simposium
 - .3 Diskusi, Raker, Seminar, Lokakarya, Orientasi
 - .4 Studi Lapangan, Kkn, Widyawisata
 - .5 Tanya Jawab / Sylabi / Modul / Kursil
 - .7 Penugasan
 - .8 Gladi
- 896 Tenaga Pengajar / Widyaiswara/Narasumber
 - .1 Moderator
- 897 Administrasi Pendidikan
 - .1 Tahun Pelajaran
 - .2 Persyaratan, Pendaftaran, Testing, Ujian
 - .3 STTP
 - .4 Penilaian Angka Kredit
 - .5 Laporan Pendidikan Dan Pelatihan
- 898 Fasilitas Belajar
 - .1 Tunjangan Belajar
 - .2 Asrama
 - .3 Uang Makan
 - .4 Uang Transport
 - .5 Uang Buku
 - .6 Uang Ujian
 - .7 Uang Semester / Uang Kuliah
 - .8 Uang Saku
- 899 Sarana
 - .1 Bantuan Sarana Belajar
 - .2 Bantuan Alat-Alat Tulis
 - .3 Bantuan Sarana Belajar Lainnya.

900 KEUANGAN

- 900 KEUANGAN
- 901 Nota Keuangan
- 902 APBN
- 903 APBD
- 904 APBN-P
- 905 Dana Alokasi Umum
- 906 Dana Alokasi Khusus
- 907 Dekonsentrasi (Pelimpahan Dana Dari Pusat Ke Daerah)
- 907 -
- 908 -
- 910 ANGGARAN
- 911 Rutin/BTL
- 912 Pembangunan/BL
- 913 Anggaran Belanja Tambahan
- 914 Daftar Isian Kegiatan (DIK)
 - .1 Daftar Usulan Kegiatan (DUK)
- 915 Daftar Isian Poyek (DIP)
 - .1 Daftar Usulan Proyek (DUP)
 - .2 Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA)
- 916 Revisi Anggaran
- 917 -
- 918 -
- 919 -
- 920 OTORISASI / SKO
- 921 Rutin
- 922 Pembangunan
- 923 SIAP
- 924 Ralat SKO
- 925 -
- 926 -
- 927 -
- 928 -
- 929 -
- 930 VERIFIKASI
- 931 SPM Rutin (daftar p8)
- 932 SPM Pembangunan (daftar p8)
- 933 Penerimaan (daftar p6. p7)
- 934 SPJ Rutin
- 935 SPJ Pembangunan
- 936 Nota Pemeriksaan
- 937 SP Pemandahan Pembukuan
- 938 -
- 939 -
- 940 PEMBUKUAN
- 941 Penyusunan Perhitungan Anggaran
- 942 Permintaan Data Anggaran Laporan Fisik Pembangunan
- 943 Laporan Fisik Pembangunan
- 944 -
- 945 -
- 946 -
- 947 -
- 948 -
- 949 -
- 950 PERBENDAHARAAN

- 951 Tuntutan Ganti Rugi (ICW Pasal 74)
- 952 Tuntutan Bendaharawan
- 953 Penghapusan Kekayaan Negara
Pengangkatan/Penggantian Pemimpin Proyek Dan
- 954 Pengangkatan/Pemberhentian Bendaharawan
- 955 Spesimen Tanda Tangan
- 956 Surat Tagihan Piutang, Ikhtisar Bulanan
- 957 -
- 958 -
- 959 -
- 960 PEMBINAAN KEBENDAHARAAN
- 961 Pemeriksaan Kas Dan Hasil Pemeriksaan Kas
- 962 Pemeriksaan Administrasi Bendaharawan
- 963 Laporan Keuangan Bendaharawan
- 964 -
- 965 -
- 966 -
- 967 -
- 968 -
- 969 -
- 970 PENDAPATAN
- 971 Perimbangan Keuangan
- 972 Subsidi
- 973 Pajak, Ipeda, IHH, IHPH
- 974 Retribusi
- 975 Bea
- 976 Cukai
- 977 Pungutan / PNBP
- 978 Bantuan Presiden, Menteri Dan Bantuan Lainnya
- 979 Pendapatan Lainnya
 - .1 Hasil penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
 - .11 Pelepasan Hak Atas Tanah
 - .12 Penjualan Rumah Jabatan, Rumah Dinas
 - .13 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua
 - .14 Penjualan Bongkaran Bangunan dan Inventaris
 - .15 Penjualan Bongkaran Bangunan Dan Inventaris
 - .16 Penjualan Drum Bekas
 - .17 Penjualan Hasil Penebangan Pohon
 - .2 Penerimaan Jasa Giro
 - .21 Jasa Giro Khas Daerah
 - .22 Jasa Giro Pemegang Kas
 - .23 Jasa Giro Khusus
 - .3 Penerimaan Bunga Bank
 - .31 Bunga Deposito
 - .32 Bunga tabungan
 - .4 Kekayaan Daerah (TPTGR)
 - .41 Sumbangan Pihak ke Tiga
 - .42 Sumbangan Pihak Ketiga Kendaraan (dealer)
 - .43 Sumbangan Pihak Ketiga Kayu
 - .5 Penerimaan Lain-lain
 - .51 Penerimaan Kembali Kredit BKK
 - .52 Ternak Tidak Layak Bibit
 - .53 Sewa Internet
 - .54 Penerimaan dan Dana Bergulir
 - .55 Kerjasama Dengan Bumida

- .56 Penerimaan DUKS
- .57 Tempat Rekreasi Nusakambangan
- .58 Setoran TP/TGR
- .59 Penerimaan Lainnya dari setda/Dinas-Dinas
- 980 -
- 981 -
- 982 -
- 983 -
- 984 -
- 985 -
- 986 -
- 987 -
- 988 -
- 989 -
- 990 BENDAHARAWAN
- 991 SKPP / SPP
- 992 Teguran SPJ
- 993 -
- 994 -
- 995 -

C. CARA PENGGUNAAN.

1. Untuk memahami pola klasifikasi terlebih dahulu harus memahami perincian pertama, kedua, dan ketiga. Selanjutnya perlu memahami hubungan antar masalah dan anak masalahnya pada pola dengan memperhatikan efek dengan prinsip berjenjang.

Tiap kode, kecuali kode masalah yang pokok pada perincian pertama merupakan bagian sub ordinat dari kode atasannya. Untuk mendapatkan gambaran yang benar masalah 147,231 harus diketahui bahwa masalah ini merupakan bagian dari 147,23 dan 147,23 merupakan bagian dari 147, 147 bagian dari 140 dan 140 bagian dari 100.

Disamping itu perlu diperhatikan khusus klasifikasi 100.

Contoh :

100	Pemerintah (Perincian pertama)
140	Desa/kelurahan (Perincian kedua)
147	Pembangunan Desa (Perincian ketiga)

2. Untuk dapat mengklasifikasi surat dengan kode yang paling tepat harus dipahami benar masalah yang dikandungnya, dari sudut mana masalah dalam surat tidak selalu mudah, pada umumnya “perihal” surat yang dicantumkan dibagian kiri atas surat memang ada hubungannya dengan masalah surat, tetapi kerap kali “perihal” tersebut merupakan petunjuk yang kurang tepat. Oleh karena itu untuk menentukan kode yang tepat, harus membaca dan memahami masalah yang dikandung dalam surat. Harus selalu diingat, bahwa penemuan kembali surat banyak sekali tergantung pada ketepatan pemberian kode.
3. Banyak surat yang mengandung lebih dari satu masalah. Masalah-masalah itu merupakan masalah yang terpisah satu sama lain atau masalah-masalah yang saling berkaitan. Dalam menghadapi hal yang demikian itu harus berhati-hati memilih masalah yang akan ditentukan menjadi masalah pokok. Masalah yang dipilih haruslah yang paling berat tekanannya, dan harus diyakini benar, bahwa itulah yang akan dikemukakan dalam penemuan kembali arsip.
4. Pemberian kode masalah dapat ditetapkan secara umum atau lebih terperinci.

Masalah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat secara berturut-turut diberi kode :

- a. 188.342 Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
- b. 188.34 Peraturan Daerah
- c. 188.3 Peraturan
- d. 188 Peraturan Perundang-undangan

Untuk instansi yang besar dapat menggunakan pemberian kode dimaksud huruf a. Sedangkan makin kecil sesuatu instansi dapat menggunakan kode kode dimaksud huruf b atau huruf c yang lebih sederhana dan untuk instansi kecil, misalnya kecamatan dapat menggunakan kode huruf d.

5. Kode Pembantu

Kode pembantu merupakan kode pelengkap yang tidak dapat dipakai tersendiri, tetapi ditambahkan kode yang memerlukan perincian lebih lanjut.

Dengan ditambahkan kode pembantu, maka dapat memberikan dimensi ekstra pada arsip.

Contoh :

591	Tata guna tanah
-----	-----------------

- .02 Perpetaan
- 147 Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa
- .13 Latihan Kerja Masyarakat
- .135 Kurikulum /silabus

6. Menyusun Kode

Untuk memperoleh kode yang spesifik, kode-kode masalah yang satu dapat digabungkan dengan kode-kode masalah yang lain.

Cara penggabungan ini dapat dilihat contohnya pada kode 050 dan 700. Perencanaan maupun proyek pembangunan dapat meliputi semua bidang kegiatan, oleh karena itu untuk memperoleh kode yang terperinci maka kode 050 dapat disambungkan dengan seluruh perincian kode dengan pola dari 000 sampai 900

Begitu juga pengawasan (700) yang meliputi bidang apapun dapat digabungkan dengan perincian kode dalam pola klasifikasi.

7. Apabila pada kode ada petunjuk "tambahan perincian" berarti harus menambahkan kode dari pola yang satu ke kode-kode pola yang lain

Contoh I : Proyek Pasar

- 050 - Perencanaan (proyek)
- 511.2 - Pasar (bidang perekonomian)
- 55.112 - Proyek Pasar

Contoh II : Proyek Jembatan

- 050 - Perencanaan
- 630 - Jembatan (bidang pekerjaan umum)
- 056.3 - Proyek jembatan. Angka 0 paling belakang sesuai titik desimal dihilangkan.

8. Ada beberapa masalah yang dapat diklasifikasikan dengan dua macam kode, dan 2 kode yang berlainan itu benar.

- a. Peraturan pemerintah tentang pensiun, bisa diklasifikasikan dengan kode 186.31 Peraturan Pemerintah atau 882.08 Peraturan tentang Pensiun.

Masalah pemberhentian dengan pensiun (882), ditambah dengan kode pembantu untuk peraturan perundang-undangan (08)

- b. Penelitian APPKD, dapat diklasifikasikan 070 (penelitian) atau 142.02 (penelitian APPKD (142) ditambah dengan kode pembantu untuk penelitian (02))

Kedua cara pengklasifikasian ini sama-sama benar.

Cara ini dimaksud untuk memberikan keleluasaan pada penataan berkas. Jika penataan berkas akan dilakukan dengan cara mengelompokkan semua jenis peraturan pemerintah, atau semua kegiatan penelitian, maka arsip diklasifikasikan tanpa kode pembantu, tetapi jika penataan berkas dilakukan berdasarkan masalah, maka yang diklasifikasikan ialah masalahnya ditambah kode pembantu.

9. Tunjuk silang

Jika dijumpai surat yang mengandung dua masalah dan masalah tersebut dan mempunyai tekanan yang sama beratnya, maka dapat diatasi dengan jalan membuat kartu tunjuk silang

Surat tersebut diklasifikasikan dengan dua kode : satu kode diisikan pada kartu kendali, dan satu kode lagi diisikan pada kartu tunjuk silang. Dengan demikian maka penemuan kembali surat dimaksud dapat dilakukan dari dua arah.

Contoh : surat tentang "pesawahan untuk transmigrasi" dapat diberi kode 521.5 (pesawahan) dengan menunjuk kode 475 (transmigrasi) atau

sebaliknya. Perlu diperhatikan bahwa penggunaan tunjuk silang terbatas pada masalah-masalah yang memang sangat penting.

10. Indeks kaitan

Untuk memudahkan menelusuri kode-kode, disusun indeks kaitan, indeks kaitan ini terdiri dari himpunan nama-nama masalah dan kaitannya yang terdapat dalam pola klasifikasi yang disusun dalam urutan abjad dengan diikuti kodenya.

Dalam indeks kaitan letak kode ada dibelakang masalah, sedangkan dalam pola klasifikasi ada didepan indeks kaitan dimaksud untuk memudahkan mencari masalah dalam arsip.

WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd.

H. BUDI BUDIMAN